



**KEBIJAKAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
KORPORASI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**INDRIATI AMARINI**

**NIM : B4A.099.079**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2002**

**UPT-PUSTAK-UNDIP**



## **UNIVERSITAS DIPONEGORO**

### **KEBIJAKAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUNGAN HIDUP**

Dipersiapkan dan Disusun

Oleh :

**INDRIATI AMARINI**

**NIM : B4A.099.079**

Telah dipertahankan di Depan Dosen Penguji

Pada Tanggal

Tesis Tersebut Telah Diterima Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Derajat Magister  
Bidang Ilmu Hukum

Semarang, Maret 2002

Universitas Diponegoro

Ketua Program Studi

Magister Ilmu Hukum

Pembimbing Tesis



**Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH**  
NIP : 130 350 519

**Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH**  
NIP : 130 350 519

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
S E M A R A N G  
2002**



## **UNIVERSITAS DIPONEGORO**

### **KEBIJAKAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Oleh :**

**INDRIATI AMARINI**

**NIM : B4A.099.079**

**Kupersembahkan :**

Kehadapan Ayahanda H. Achmad Moehadjir  
dan Ibunda Mardiyati, Suami Cahyono, S.H.,  
anak-anak Rizky Aulia Cahyadri dan Nisrina  
Dwi Cahyarini.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
S E M A R A N G  
2002**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. atas berkat dan rahmat-Nya jualah penyusunan laporan hasil penelitian (tesis) ini dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun sebagai syarat akhir dalam menempuh studi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Adapun judul tesis ini adalah :  
**KEBIJAKAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
DALAM PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUNGAN HIDUP.**

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pemilihan judul sampai pada penyusunan laporan hasil penelitian (tesis) ini yaitu :

1. Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan selaku Pembimbing dalam penyusunan tesis ini yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing penulis
2. Seluruh tenaga pengajar dan staf pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
3. Seluruh pimpinan, tenaga pengajar dan staf di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin dan Kopertis Wilayah XI Kalimantan dimana penulis mengabdikan diri selama ini

4. Ayahanda H. Achmad Moehadjir Hasboellah dan Ibunda Mardiyati yang telah memberikan dorongan dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi selama ini
5. Suami Cahyono, SH. yang sedang bertugas di Pengadilan Negeri Atambua Nusa Tenggara Timur, anak-anak Rizky Aulia Cahyadi dan Nisrina Dwi Cahyarini yang selalu memberikan motivasi, mendorong dan mendoakan penulis selama studi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
6. Tidak lupa rekan-rekan seperjuangan yang telah bersama-sama menuntut ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Angkatan 1999 Kelas SPP Pagi
7. Dan semua pihak yang tidak dapat disampaikan satu per satu.

Atas berkat bantuan baik spiritual maupun material, bimbingan, dorongan dari beliau penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga selalu mendapat lindungan dan hidayah dari Allah S.W.T (amin).

Akhir kata penulis mengharap segala kritik dan saran dari pembaca demi sempurnanya penyusunan tesis ini.

Semarang, Maret 2002

Penulis,

**INDRIATI AMARINI**  
**NIM : B4A.099.079**

## INTISARI

Korporasi dijadikan sebagai subjek hukum pidana merupakan fenomena kebijakan legislatif dalam produk perundang-undangan dewasa ini. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis ingin mengkaji lebih jauh dengan mengadakan penelitian tentang kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan lingkungan hidup. Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah mengenai kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan lingkungan hidup saat ini (kebijakan faktual) dan kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan lingkungan hidup untuk masa yang akan datang (kebijakan perspektif atau kebijakan ideal).

Sasaran utama penelitian ini adalah kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan lingkungan hidup maka pendekatan yang utama terhadap masalah ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*. Untuk menunjang pendekatan *yuridis-normatif* tersebut dilakukan juga pendekatan *yuridis-empiris*. Data yang telah berhasil dikumpulkan dianalisis secara *normatif-kualitatif* dengan mempergunakan metode penguraian *deskriptif-analitis*.

Berdasarkan hasil penelitian maka kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan lingkungan hidup yang saat ini berlaku belum diatur secara lengkap mengenai permasalahan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana, dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan dan jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan untuk korporasi terutama dalam perundang-undangan sektoral.

Kemudian berdasarkan perkembangan dunia internasional, pendapat para sarjana maka secara teoritis korporasi dapat diterima sebagai subjek hukum pidana (bukan lagi suatu fiksi). Seiring dengan adanya fenomena kebijakan legislatif yang mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum pidana seyogyanya diatur pula ketentuan secara rinci yang berkaitan dengan permasalahan sistem pemidanaan (pertanggungjawaban korporasi). Disamping itu sehubungan dengan ide bahwa Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan undang-undang payung (*umbrella act*) maka seyogyanya hal tersebut juga diatur dalam perundang-undangan lingkungan hidup sektoral.

## ABSTRACT

Corporation became as criminal law's subject was phenomena of legislative policy in institution's product in time. In connection with it what the author want to know far with makes observation about liability of corporation criminal responsibility system in legislations of environment. As regards the problem that the author wants to write is about policy of corporation criminal responsibility system in the environment legislation this time (factual policy) and for future (perspective policy or ideals policy).

The main target of this research is legislative policy defining corporation criminal responsibility system in environment legislation so the main of approach to this problem is legal-normative approach. For suporting the legal-normative approach is done the social legal approach too. The data was submitted then to analisys with normative-qualitative way with use descriptive-analysis explanation methode.

Besides the research that policy system responsibility criminal corporation in the environment legislation that this time to conduct not over to discuss until complycated about the problem what must could. Responsibility, when corporation we says done the criminal problem, in the casus how corporation could responsibility and the kinds of sanction that can divorceced to corporation especially in the sectoral legislation.

After that besides a change new world international the opinion from the scholar that we see from the thearty of corporation we can accepted to be a subject criminal law's (not again to be fiction) with the a phenomena legislatif policy that contributed corporation to be a subject criminal laws that usually it will contribute also the rule so clearly that it have relationship with the problem criminally system (responsibility corporation). Besides that with the idea about the primary law's manages environments it's a umbrella provision (umbrella act) that why this matter also to manage into sectoral environment legislations.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
 BAB I     PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika.....	14
 BAB II     TINJAUAN PUSTAKA.....	 15
A. Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana .....	15
B. Sistem Pidana / Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .	27
C. Ruang Lingkup TPLH Dalam Perundang-undangan Di Indonesia.....	35
 BAB III    HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....	 61
A. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Perundang-undangan Lingkungan Hidup Saat ini ..	61
1. Siapa Yang Dapat Dipertanggungjawabkan.....	62
2. Kapan Korporasi Dikatakan Melakukan Tindak Pidana ....	64
3. Dalam Hal Bagaimana Korporasi Dapat Dipertanggung jawabkan .....	65



4. Jenis-Jenis Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan Untuk Korporasi .....	66
B. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Yang Akan Datang .....	71
1. Siapa Yang Dapat Dipertanggungjawabkan.....	71
2. Kapan Korporasi Dikatakan Melakukan Tindak Pidana....	92
3. Dalam Hal Bagaimana Korporasi Dapat Dipertanggungjawabkan .....	95
4. Jenis-Jenis Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan Untuk Korporasi	102
BAB IV PENUTUP .....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang.

Berkaitan dengan hal tersebut Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999 – 2004 (Ketetapan Nomor IV/MPR/1999) telah menegaskan bahwa Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

Dalam rangka mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh, harus

didasarkan pada hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dan landasan hukum mengenai pengaturan tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut **Daud Silalahi**<sup>1)</sup> permasalahan lingkungan telah ada dihadapan kita dan berkembang sedemikian cepatnya baik di tingkat nasional maupun internasional (global dan regional). Sedangkan mengenai permasalahan lingkungan ini, **Muladi**<sup>2)</sup> berpendapat bahwa persoalan lingkungan menjadi semakin kompleks. Tidak hanya bersifat praktis, konseptual ekonomi saja tetapi juga merupakan masalah etika baik sosial maupun bisnis. Yang dilindungi oleh hukum (pidana) tidak hanya alam, flora dan fauna (*the ecological approach*), tetapi juga masa depan kemanusiaan yang kemungkinan menderita akibat *degredasi* lingkungan hidup (*the antropocentris approach*). Dengan demikian muncul istilah "*the environmental laws carry penal sanction that protect a multitude of interest.*"

Menurut **Koesnadi Hardjasoemantri**<sup>3)</sup> perkembangan undang-undang tentang lingkungan hidup khususnya di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini.

<sup>1)</sup> Daud Silalahi, 1992, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung : Alumni, h. 9.

<sup>2)</sup> Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : BP UNDIP, h. 196.

<sup>3)</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, h. 6.

Adapun perhatian terhadap masalah lingkungan hidup ini dimulai di kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2 (1970-1980).”

Konferensi Internasional tentang lingkungan hidup pada bulan Juni 1972 tersebut telah menghasilkan “Deklarasi Stockholm” yang berisi 26 asas berikut 109 rekomendasi pengimplementasiannya dan sebagai tindak lanjut dari konferensi tersebut 10 tahun kemudian, pada tanggal 11 Maret 1982 lahir lah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UULH), Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215 yang telah menandai awal pengembangan perangkat hukum sebagai dasar bagi upaya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Menurut **Muladi**<sup>4)</sup> persoalan kejahatan lingkungan secara yuridis dikategorikan sebagai tindak pidana administrasi (*administrative penal law*) atau tindak pidana yang mengganggu kesejahteraan masyarakat (*public welfare offenses*). Tindak pidana ini semakin populer dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jangka waktu pemberlakuan undang-undang tersebut selama ini menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana lingkungan hidup secara idiil dimaksudkan untuk dapat melakukan rekayasa sosial (*social engineering*), masih memerlukan penyempurnaan ditinjau dari seluruh tindak

---

<sup>4)</sup> Muladi, *Op. Cit.*, h. 191

pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsible*) dan sanksi (*sanction*) baik yang merupakan pidana (*punishment*) maupun tindakan tata tertib (*treatment*).

Pada umumnya tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia atau orang pribadi. Oleh karena itu hukum pidana selama ini hanya mengenal orang seorang atau kelompok orang sebagai subjek hukum yaitu sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Hal ini bisa dilihat dalam pasal-pasal KUHPidana yang dimulai dengan kata “barang siapa” yang secara umum mengacu kepada orang atau manusia.

Dalam perumusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat TPLH) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUP LH), selalu diawali dengan kata “barangsiapa” yang menunjuk pada pengertian “orang.” Namun dalam Pasal 1 sub 24 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah perseorangan dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum. Demikian pula dalam Bab IX tentang Ketentuan Pidana, ada pasal yang mengatur tentang pertanggungjawaban badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, organisasi lain (Pasal 45 dan Pasal 46). Dengan demikian orang dan korporasi (badan hukum dan sebagainya) dapat menjadi subjek TPLH dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut **Barda Nawawi Arief**<sup>5)</sup> dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi (badan hukum dan sebagainya) maka berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, pertanggungjawaban pidana (penuntutan dan pidanaan) dapat dikenakan terhadap :

- a. badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut;
- b. mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin atau
- c. Kedua-duanya.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas maka Pasal 46 merupakan suatu kemajuan (hal baru) dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982.

Selanjutnya menurut **Clinard B. Marshall** dan **Peter C. Yeager**<sup>6)</sup> dalam perkembangan akhir-akhir ini terutama di dalam bidang ekonomi dan lingkungan hidup, badan hukum/korporasi dapat terlibat secara langsung dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan orang banyak ataupun negara.

Dengan melihat gejala pelanggaran hukum yang dapat dilakukan korporasi seperti tersebut di atas, maka pada kesempatan ini penulis bermaksud untuk melakukan suatu penelitian yang lebih mendalam, khususnya masalah sistem pidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam perundang-

---

<sup>5)</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni h. 106 -- 107.

<sup>6)</sup> Dalam M. Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung : Mandar Maju, h. 63.

undangan lingkungan hidup. Adapun pokok permasalahannya ialah peninjauan kembali terhadap pengaturan sistem pidana (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam perundang-undangan lingkungan hidup yang sekarang berlaku (kebijakan faktual) dan yang akan datang (kebijakan ideal/perspektif).

Penentuan pokok permasalahan seperti di atas, terutama didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Kebijakan kriminal atau "*criminal policy*" menurut **Marc Ancel** adalah "*the rational organization of the control of crime by society*", artinya adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>7)</sup> Penetapan sanksi pidana di dalam perundang-undangan seperti halnya sanksi pidana terhadap korporasi dalam undang-undang tentang lingkungan hidup merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Sehubungan dengan itu, perlu kiranya dipertanyakan mengenai bagaimanakah sistem pidana (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam perundang-undangan lingkungan hidup selama ini.
2. Apabila melihat keseluruhan proses kebijakan hukum pidana, maka kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis karena disamping sebagai tahap perumusan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pidana, juga merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap selanjutnya yaitu tahap penjatuhan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.

---

<sup>7)</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, h. 2.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka untuk mengoperasionalkan sanksi pidana terhadap korporasi dalam TPLH, maka bagaimanakah kebijakan-kebijakan yang seharusnya ditempuh dan kebijakan-kebijakan yang seyogyanya ditempuh oleh badan pembuat undang-undang.

3. Dalam forum Internasional khususnya dalam perkembangan konggres-kongres PBB mengenai "*The Prevention of Crime and the treatment of Offenders*", masalah kejahatan lingkungan (*environmental crime*) merupakan salah satu kejahatan yang mendapat perhatian kongres PBB untuk ditanggulangi. Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya menarik untuk diamati dan dikaji sejauh mana kecenderungan Internasional tersebut memberikan pengaruh terhadap konsep kebijakan pidana dan pemidanaan di Indonesia.
4. Adanya perkembangan aliran di dalam hukum pidana yaitu aliran "*social defence*" yang mengajukan suatu konsep tentang tujuan pidana dan hukum pidana yang cukup relevan dengan jiwa falsafah Pancasila dan UUD 1945 berupa perlindungan sosial dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimanakah sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kebijakan perundang-undangan lingkungan hidup saat ini ?



2. Bagaimanakah sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kebijakan perundang-undangan lingkungan hidup yang akan datang ?

### **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji dan menganalisa mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kebijakan perundang-undangan lingkungan hidup saat ini.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kebijakan perundang-undangan lingkungan hidup yang akan datang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil-hasil penelitian yang akan diperoleh nanti, diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, yaitu :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran akademis bagi upaya pengkajian dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan lingkungan hidup di Indonesia.

#### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dalam melakukan peninjauan sistem

pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan tentang lingkungan hidup.

- b. Dapat memberikan bahan pemikiran atau pertimbangan bagi aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana lingkungan hidup. Masukan-masukan yang berkaitan dengan sanksi pidana dalam kasus-kasus lingkungan hidup diharapkan dapat membantu mengoptimalkan penegakan hukum dengan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pada saat menguraikan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis telah menyinggung mengenai tujuan negara Indonesia menurut alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah :

“untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”. Tujuan negara yang demikian dipandang sebagai landasan kebijakan umum atau kebijakan sosial, sekaligus menjadi landasan kebijakan hukum, termasuk di dalamnya kebijakan kriminal yang dikenal dengan istilah politik kriminal.

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Apabila lembaga legislatif menetapkan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan maka penetapan kebijakan tersebut juga dimaksudkan

untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh negara yaitu melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Pengertian “melindungi segenap bangsa” dan “memajukan kesejahteraan umum” dalam konteks falsafah Pancasila yang menganut prinsip “*mono-dualistik*”, tidak hanya ditujukan pada “perlindungan terhadap masyarakat” dan “memajukan kesejahteraan masyarakat” semata-mata, tetapi tercakup juga di dalamnya “perlindungan terhadap individu” dan “memajukan kesejahteraan individu”.

Kerangka pemikiran yang demikian apabila dikaitkan dengan tujuan pidana, maka tujuannya adalah untuk mewujudkan dua kepentingan secara seimbang yaitu perlindungan individu dan perlindungan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka lembaga legislatif perlu menetapkan perencanaan secara rasional mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan lingkungan hidup.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah masalah kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan lingkungan hidup. Kebijakan penetapan pidana tersebut merupakan fase awal dari proses perwujudan pidana sekaligus

merupakan landasan bagi fase-fase berikutnya yaitu fase penjatuhan pidana dan fase pelaksanaan pidana.

Apabila melihat sasaran utama penelitian ini adalah kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan lingkungan hidup maka pendekatan yang utama terhadap masalah ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*. Untuk menunjang pendekatan yuridis-normatif tersebut, dilakukan juga pendekatan yuridis-empiris.

Pendekatan yuridis-empiris, dimaksudkan untuk melihat gambaran nyata yang terjadi pada fase penerapan dan fase pelaksanaan dari kebijakan penetapan yang telah ditempuh pada fase awal atau fase penetapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pendekatan yuridis-empiris sifatnya hanya menunjang atau memperdalam.

## **2. Lokasi Penelitian**

Sanksi pidana merupakan salah satu jenis sanksi yang telah dituangkan dalam undang-undang lingkungan hidup dan secara formal berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Bertolak dari kenyataan tersebut maka sesungguhnya lokasi dari penelitian ini meliputi seluruh propinsi di Indonesia, namun dalam hal ini penelitian akan dilaksanakan di Propinsi Kalimantan Selatan.

Pemilihan lokasi penelitian sebagaimana tersebut di atas didasarkan atas suatu pertimbangan dari segi biaya, waktu dan tenaga. Sesungguhnya kebijakan penerapan dan pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup sama di seluruh wilayah Indonesia sebagai hukum materiil yang berlaku umum. Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan hasil penelitian di lokasi penelitian yang telah ditentukan tersebut dapat memberikan gambaran secara menyeluruh.

### **3. Responden Penelitian**

Responden yang akan ditunjuk dalam penelitian ini adalah hakim, jaksa, polisi (aparatus penegak hukum), pengacara dan pengusaha di Propinsi Kalimantan Selatan.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Apabila melihat maksud dan tujuan penelitian sebagaimana telah disinggung di depan maka data-data yang ingin diperoleh adalah data sekunder, disamping itu juga data primer sebagai penunjang. Adapun metode atau cara yang ditempuh untuk mendapatkan data-data tersebut adalah dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

#### **a. Studi Kepustakaan**

Studi Kepustakaan, dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu melalui perundang-undangan, rancangan Konsep KUHP Nasional,

hasil-hasil penelitian, karya ilmiah, kegiatan-kegiatan ilmiah baik nasional dan internasional, pendapat para ahli.

**b. Studi Lapangan**

Studi lapangan, dimaksudkan untuk mendapatkan data-data primer, yaitu data yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaan sistem pemidanaan korporasi dalam perundang-undangan lingkungan hidup seperti : hakim, jaksa, polisi (aparatus penegak hukum), pengacara dan pengusaha yang kesemuanya dilakukan dengan metode atau cara mengajukan beberapa pertanyaan tertulis.

**5. Teknik Penyajian dan Analisis**

Teknik yang ditempuh dalam menyajikan data yang diperoleh dari penelitian adalah teknik kualitatif dan teknik kuantitatif. Data tersebut kemudian dianalisis secara *normative - kualitatif*, dengan mempergunakan metode penguraian *deskriptif-analitis*.

Teknik penguraian sebagaimana tersebut di atas terutama didasarkan pada suatu pemikiran bahwa penelitian yang akan dilakukan tidak hanya dimaksudkan untuk menggambarkan atau mengungkapkan data-data sebagaimana adanya, melainkan juga dimaksudkan untuk mengungkapkan realitas kebijakan legislatif seperti yang diharapkan.

## **G. Sistematika**

Setelah uraian pendahuluan pada Bab I maka selanjutnya pada Bab II disajikan Tinjauan Pustaka. Dalam Bab II diuraikan tentang : A. Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana, B. Sistem Pidanaan (pertanggungjawaban pidana korporasi), C. Ruang Lingkup TPLH Dalam Perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya dalam Bab III disajikan Hasil Penelitian dan Analisis yang berisi : A. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Perundang-undangan lingkungan hidup saat ini, B. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Perundang-undangan lingkungan hidup yang akan datang. Bab IV Penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan saran serta menyertakan lampiran yang dianggap perlu.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana

Perkembangan yang memberikan pengakuan pada korporasi sebagai subjek tindak pidana dapat dibedakan menjadi tiga tahap yaitu :

##### Tahap Pertama

Tahap ini ditandai dengan usaha agar tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dibatasi pada perorangan (*naturlijk persoon*). Pembentuk undang-undang sejak tahun 1886 telah memasukkan dalam beberapa peraturan dan undang-undang. Namun kesulitan timbul ketika perumusan perbuatan pidana tersebut secara jelas atau implisit ditujukan pada keadaan yang hanya dimiliki oleh badan hukum sendiri.

Sejak Tahun 1902, Hoge Raad tidak mengakui “lompatan kecil dari badan hukum ke organ” seperti interpretasi yang dilukiskan oleh Remmelink dengan menentukan bahwa pengurus perusahaan tram bukanlah perusahaan itu sendiri. Ares baku (*standaardarrest*) kemudian mengenai hal ini berpendapat sebagai berikut<sup>1)</sup> :

1. Apa yang disebut *Wilde-bussen-arrest* dari tahun 1938 (Putusan Bis-Bis Liar) perihal pengangkutan penumpang dengan mempergunakan otobis tanpa

---

<sup>1)</sup> Dalam J.E. Sahetapy, 1995, *Hukum Pidana* (Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia – Belanda), Yogyakarta : Liberty, h. 274 – 278.



izin (izin tersebut harus diberikan kepada badan hukum dan bukan kepada direktornya. Oleh karena itu hanyalah badan hukumnya yang dapat mengangkut tanpa izin).

2. *Gelderse Spoorwegreclame-arrest* dari tahun 1952 dimana Hoge Raad memutuskan bahwa peraturan yang dilanggar tidak ditujukan terhadap para pengurus, akan tetapi kepada *NV Spoorwegreclame* sendiri.

Melakukan perbuatan pidana (*plegen*) pada waktu itu diartikan sebagai suatu perbuatan fisik oleh si pembuat. Sesudah itu timbul perubahan secara perlahan-lahan. Selanjutnya akhir tahun empat puluh dan pada permulaan tahun kelima puluh pandangan ini dikukuhkan dalam beberapa putusan hakim. Dalam hubungan ini **Pompe** membahas tentang pembuat pidana secara rohaniah. **Roling** menandai kejadian-kejadian ini dengan bersumber pada pemikiran bahwa si pembuat perbuatan pidana yang memenuhi fungsi menjual dan lain-lain sebagai pembuat pidana fungsional. **Mulder** menganjurkan istilah “pembuat perbuatan pidana yang berwenang mengatur” (*beschikkingsdader*).

Sebagai akibat dari perluasan pengertian dalam hal pembuat pidana secara fisik maka banyak kejadian yang dahulu harus diselesaikan dengan “menyuruh melakukan” (*doen plegen*) sekarang harus diselesaikan melalui “melakukan perbuatan pidana” (*plegen*). Hal inilah yang merupakan dorongan kuat yang menjurus kepada pengakuan perbuatan pidana dari korporasi.

### **Tahap Kedua**

Tahap ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah Perang Dunia I dalam perumusan undang-undang, bahwa suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh korporasi. Namun tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut. Perumusan yang khusus untuk ini yaitu apabila suatu perbuatan pidana dilakukan oleh atau karena suatu badan hukum, tuntutan pidana dan pidana harus dijatuhkan terhadap anggota pimpinan. Secara perlahan-lahan tanggungjawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan atau kepada mereka yang secara nyata memimpin melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Pertanggungjawaban pidana yang langsung dari korporasi masih belum muncul.

### **Tahap Ketiga**

Tanggungjawab pidana langsung dari korporasi pada akhirnya dianut yaitu pada waktu dan sesudah Perang Dunia Kedua. Korporasi dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, disamping sebagai pemberi perintah atau pimpinan yang nyata telah berperan pada perbuatan pidana itu. Hal ini terjadi pertama kali untuk "*ordenings strafrecht*" dalam putusan pengendalian harga pada tahun 1941. Paragraf 6 ayat 2 berbunyi : "badan-badan hukum dari perseroan-perseroan sama halnya dengan perorangan (*natuurljikpersoon*) dapat dijatuhkan pidana".

Sedangkan perkembangan histories korporasi sebagai subjek tindak pidana di Inggris sebagaimana diuraikan oleh

John C. Coffee, Jr.<sup>2)</sup>, pada mulanya ada beberapa penghalang yang menyebabkan pengadilan di Inggris tidak mengakuinya yaitu :

- a. Adanya doktrin "*respondeat superior*" (yaitu prinsip bahwa seseorang bertanggungjawab secara perdata untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh agen/anak buahnya) dalam hukum ganti rugi (*tort law*) pada abad 19 yang kurang mempunyai landasan konseptual untuk mempertanggungjawabkan perbuatan individu kepada korporasi.
- b. Sulitnya mencari unsur "*mens rea*" pada korporasi.
- c. Adanya doktrin "*ultra vires*" yang mengandung hambatan konseptual, karena sampai abad 19 doktrin ini membatasi kekuasaan korporasi pada perbuatan-perbuatan yang dibenarkan menurut anggaran dasar. Karena anggaran dasar secara formal hanya memberi kewenangan kepada korporasi untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan hukum, maka secara logis korporasi tidak mempunyai kekuasaan untuk melakukan kejahatan.
- d. Penuntutan korporasi tidak dapat dicocokkan dengan persyaratan prosedural yang kaku, antara lain terdakwa harus dihadirkan secara personal ke pengadilan. Hukum Inggris tidak menyukai peradilan *in absentia*.

Selanjutnya dikatakan bahwa hambatan-hambatan ini tidak sepenuhnya menghalangi adanya pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal

---

<sup>2)</sup> Dalam Barda Nawawi Arief, 2001, *Perbandingan Hukum Pidana (Sari Kuliah II)*, Semarang : Program Magister Hukum UNDIP, h. 148 – 153.

ini dikarenakan semakin meluasnya industrialisasi di Inggris pada pertengahan abad 19. Pengadilan-pengadilan waktu itu dihadapkan pada pelanggaran-pelanggaran hukum oleh perusahaan-perusahaan kereta api dan mereka merespon dengan menyatakan bahwa korporasi itu sendiri dapat dituntut untuk tindak pidana *omissi* (kasus *Regina versus Brimingham & Gloucester Railway*). Semula alasan yang mendasarinya cukup sederhana yaitu dalam perkara *omissi* tidak ada agen / wakil perusahaan yang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan korporasi sebab hanya korporasi yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan dalam melaksanakan tugasnya.

Perkembangan selanjutnya yaitu pada permulaan abad 20, akan tetapi ada perbedaan mendasar antara pengadilan di Amerika dan pengadilan di Inggris yaitu<sup>3)</sup>

#### 1. Pengadilan di Amerika.

Pengadilan Amerika merespon suasana politik di era kemajuan dengan memperluas pertanggungjawaban korporasi pada delik-delik *mens rea* dan dengan membuat tidak relevan tingkatan/kedudukan agen di dalam hirarkhi korporasi.

Kasus di Amerika yang menonjol adalah putusan *Supreme Court* tentang *New York Central & Hudson River R.R.v. United States* (1909) yang memperkuat / membenarkan larangan memberikan potongan harga

---

<sup>3)</sup> *Ibid.*, h. 150-153

(*rebate*) oleh perusahaan-perusahaan angkutan umum (*common carriers*) dalam perdagangan antar negara sebagaimana ditetapkan dalam *Elkins Act 1903*. Dalam *Elkins Act*, konggres menetapkan secara khusus bahwa perbuatan / tidak berbuat dari pejabat dalam ruang lingkup tugasnya dipandang sebagai perbuatan korporasi yang mempekerjakan dia. Oleh karena itu pengadilan dihadapkan pada maksud dari undang-undang untuk menerapkan *vicarious liability* untuk tindak pidana yang mensyaratkan adanya kesengajaan tertentu.

Dalam putusan tersebut terlihat jelas bahwa hal itu merupakan taktik yang digunakan oleh perusahaan industri untuk mempertahankan kekuasaan monopoli dan merupakan tuntutan dari para pembaharu era kemajuan (*Progressive era reformers*) yang upaya-upayanya terkulminasi pada UU Elkins itu.

Berdasarkan latar belakang historis inilah maka pengadilan tidak hanya menerima kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi tetapi menyatakan perlunya dirumuskan dalam kalimat-kalimat yang tegas.

## 2. Pengadilan di Inggris

Pengadilan Inggris menganut secara sempit "*alter ego*" atau teori "*organ*" (yaitu teori pertanggungjawaban korporasi pada delik-delik *mens rea*) yang menyatakan bahwa hanya pada perbuatan dari pejabat

senior (yang merupakan “otak” korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Berdasarkan teori bahwa korporasi hanya bertanggungjawab untuk perbuatan-perbuatan dari “*alter ego*” nya maka pertanggungjawaban korporasi tidaklah bersifat *vicarious* karena perbuatan jahat atau kesengajaan tidaklah dihubungkan / dipersalahkan dari agen ke kepala (*principal*) tetapi lebih pada korporasi yang ditetapkan sesuai dengan tujuan hukum pidana, dibatasi pada pejabat senior dan para direktornya. Perbedaan ini dijelaskan melalui *analogi antropomorfik* : agen-agen tingkatan bawah semata-mata dilihat sebagai tangan-tangan korporasi, sedangkan pejabat senior merupakan “jiwa” nya dan “kehendak” nya dan oleh karena itu dipandang sebagai korporasi itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut maka menurut hukum Inggris hanya perbuatan para pejabat senior dapat dipersalahkan kepada korporasi apabila terlibat dalam melakukan delik-delik *mens rea*. Bahkan dalam kasus yang berhubungan dengan undang-undang yang memuat standar *strict liability*, hukum Inggris mengizinkan korporasi mengajukan pembelaan (alasan penghapusan pidana) harus perbuatan agen itu bertentangan dengan kebijakan korporasi dan oleh karenanya tidak dibenarkan atau tidak sah.

Dalam sejarah perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana sebagaimana telah diuraikan diatas, ada banyak kritik terhadap ide

pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Menurut **Mr. E. Ph. Sutorius**<sup>4)</sup>, pendapat-pendapat yang menentang tanggungjawab akibat pidana dari korporasi adalah :

- a. Semua teori hukum pidana dibangun atas orang sebagai pelaku perbuatan pidana ;
- b. Hanya sebagian dari sistem pidana yang dapat diterapkan ;
- c. Meliputi pergeseran tanggung akibat orang ke korporasi ;
- d. Melanggar asas *ne bis in idem* dengan menggunakan perbuatan dan sengaja atau alpa dua kali ;
- e. Membahayakan pekerjaan para pegawai korporasi.

Sedangkan kritik **Peter Gillies**<sup>5)</sup>, terhadap ide pertanggungjawaban pidana korporasi adalah :

- a. Ketidakadilan dari *vicarious liability* yang meliputi :
  1. *Vicarious liability* hanya tetap sebagai prinsip untuk hukum ganti rugi (*tort law*) karena pembedanya terletak pada pembagian kerugian dengan tujuan-tujuan dalam hukum pidana.
  2. *Vicarious liability* tidak adil karena bebannya jatuh pada yang tidak bersalah daripada yang salah, yaitu hukuman ditanggung oleh para pemegang saham dan orang-orang lain yang

4) Dalam I.E. Sahetapy, *Op. Cit.* h. 444.

5) Dalam Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* h. 160-161

mempunyai kepentingan dalam korporasi, daripada dibebankan pada individu yang bersalah.

3. *Vicarious liability* menghasilkan disparitas antara bisnis yang dilakukan dalam bentuk korporasi dengan yang bersifat kepemilikan karena pemilik individual tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana untuk perbuatan-perbuatan bebas dari para pegawainya.
  4. *Vicarious liability* untuk korporasi dapat membuka pintu di masa yang akan datang untuk *vicarious liability* yang diperluas juga bagi individu.
- b. Ketidakefisiensian dari pertanggungjawaban korporasi yang meliputi:
1. Korporasi sebagian besar tidak dapat dicegah, denda tidak efektif dan hanya penjara atas kesalahan individual yang mencapai pencegahan riil.
  2. Penuntutan korporasi dapat membawa pengadilan, para juri dan penuntut umum untuk menolak tuduhan terhadap terdakwa individu dan oleh karena itu pertanggungjawaban korporasi semacam pelindung dimana orang yang benar-benar bersalah dapat bersembunyi.
  3. Sanksi perdata lebih fleksibel dan berpotensi lebih berat dan juga menghindari pembatas-pembatas undang-undang yang berhubungan dengan penuntutan pidana.



4. Tidak ada pencegahan tambahan (*additional deterrence*) yang dicapai lewat UU federal, karena "*affirmative defence*" juga akan memberikan dorongan kepada korporasi untuk mengawasi dan mengatur pegawai-pegawainya.

Di lain pihak, ada pendapat-pendapat yang menyetujui pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu :

- a. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi maka akan terdapat kekosongan pemidanaan apabila korporasi adalah pemilik atau pemegang izin.
- b. Jelas bahwa korporasi adalah pelaku fungsional dan menerima keuntungan dari berbagai kegiatan termasuk yang bersifat pidana.
- c. Pertimbangan Praktis :
  - 1) Tidak mudah untuk menelusuri garis perintah dalam hal terjadi kejahatan dalam korporasi.
  - 2) Pidana terhadap pengurus korporasi tidak mempengaruhi perbuatan korporasi.
- d. Selaras dengan perkembangan dalam hukum perdata.<sup>6)</sup>

Sedangkan **Peter Gillies**<sup>7)</sup> mengungkapkan bahwa beberapa kritik mengenai pertanggungjawaban korporasi telah meragukan apakah korporasi itu sendiri dapat dicegah dengan pidana. Namun suatu evaluasi

---

<sup>6)</sup> Dalam J.E. Sahetapy, *Op.cit.* 445

<sup>7)</sup> Dalam Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, h. 163

prematur memberikan kesimpulan lain bahwa korporasi cenderung menerima sangat sedikit denda dibandingkan dengan ukuran / besarnya korporasi, penghasilannya ataupun keuntungan yang diharapkan diperoleh dari delik yang dilakukan. Adapun alasan penggunaan hukum pidana terhadap korporasi disebutkan antara lain :

- a. Hukum pidana dipandang mampu melaksanakan peranan edukatif dalam mendefinisikan / menerapkan dan memperkuat batas-batas perbuatan yang dapat diterima ;
- b. Hukum pidana bergerak dengan langkah lebih cepat daripada perdata. Dengan pidana restitusi, lebih cepat memperoleh kompensasi bagi korban ;
- c. Peradilan perdata terhalang untuk mengenakan sanksi pidana ;
- d. Penuntutan bersama (korporasi dan agennya) memerlukan suatu forum pidana apabila ancaman pengurangan digunakan untuk mencegah individu. Dari sudut penegakan hukum, peradilan bersama itu cukup beralasan karena lebih murah dibanding dengan penuntutan terpisah dan penuntut umum mengikuti kasus itu dalam cara yang terpadu.

Sedangkan sejarah perkembangan dimasukkannya badan hukum sebagai subjek tindak pidana di Indonesia sudah dikenal sejak tahun 1951 yaitu keluarnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang yang sekarang sudah tidak berlaku lagi

berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962. Badan hukum sebagai subjek tindak pidana kemudian dikenal luas pada tahun 1955 dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 / Drt / 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.<sup>8)</sup>

Apabila melihat sejarah perkembangan dimasukkannya badan hukum sebagai subjek tindak pidana dalam perundang-undangan di luar KUHPidana yang dimulai sejak tahun 1951 maka ada beberapa aspek yang mempengaruhi badan hukum itu dijadikan subjek hukum pidana yaitu perkembangan di bidang perekonomian. Perkembangan tersebut dimulai sejak tahun 1950-an dengan adanya proses internasionalisasi yang menembus batas-batas wilayah negara nasional yang dipercepat lagi dengan semakin banyaknya kegiatan kerja sama ekonomi internasional serta penanaman modal asing.<sup>9)</sup> Di samping itu juga merupakan tuntutan dari pembangunan di bidang hukum itu sendiri.<sup>10)</sup>

Selanjutnya formulasi badan hukum sebagai subjek hukum pidana dalam perundang-undangan dapat digolongkan ke dalam dua bagian yaitu ada perundang-undangan yang merumuskan secara tegas bahwa badan hukum merupakan subjek hukum pidana undang-undang tersebut dan sekaligus dimuat dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai ketentuan

<sup>8)</sup> Andi Hamzah, 1986, *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta : Erlangga, h. 28

<sup>9)</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, *Pembinaan Hukum Nasional Dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Badung Universitas Padjadjaran, h.30

<sup>10)</sup> Satjipto Raharjo, 1983, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Bandung : Alumni h. 31

pidananya (seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 1997). Kedua ada perundang-undangan yang merumuskan bahwa badan hukum itu termasuk dalam subjek hukum pidana dari undang-undang tersebut, akan tetapi tidak dimuat secara tegas dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai ketentuan pidananya (seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1983).<sup>11)</sup>

#### B. Sistem Pemidanaan (Pertanggungjawaban Pidana) Korporasi

Pengertian “pemidanaan” yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum pidana tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana tersebut agar benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.<sup>12)</sup>

Apabila dilihat sebagai proses mekanisme penegakan hukum pidana maka ketiga tahapan ini merupakan suatu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem yang disebut sistem pemidanaan.

---

<sup>11)</sup> M. Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung : Mandar Maju, h. 66- 67

<sup>12)</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, h. 91

Sistem pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) terhadap korporasi berkaitan erat dengan kebijakan legislatif yang tertuang dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut maka sistem pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi akan diuraikan lebih lanjut yang meliputi:

1. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan,
2. Kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana,
3. Dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan, dan
4. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan/dikenakan untuk korporasi.

#### 1. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan

Pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang siapa yang dapat pertanggungjawaban terlebih dahulu harus mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat).<sup>13)</sup>

Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tetapi tidak selalu demikian. Hal ini tergantung pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban pidana yang ditempuh oleh pembuat undang-undang. Mengenai hal ini **Barda Nawawi Arief** <sup>14)</sup> mengatakan bahwa masalah penentuan siapa yang menjadi pembuat tidaklah ada kesulitan dalam hal pembuat undang-undang memberikan spesifikasi atau identitas yang jelas siapa yang dinyatakan sebagai pembuat.

---

<sup>13)</sup> Ibid. h. 136

<sup>14)</sup> Ibid. h. 135

Setelah menentukan pembuat maka permasalahan selanjutnya adalah mengenai pertanggungjawaban pidananya. Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi selama ini ada bermacam-macam cara perumusan yang ditempuh oleh pembuat undang-undang, yaitu :

- a. Yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang (misalnya dalam KUHPidana).
- b. Yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan atau perserikatan, akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan hanyalah orang dan apabila perserikatan yang melakukan maka yang dapat dipertanggungjawabkan adalah (anggota) pengurus (misalnya dalam Ordonansi Devisa, Undang-Undang Penyelesaian Perburuhan)
- c. Yang dapat melakukan maupun yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan/atau perserikatan itu sendiri (misalnya dalam Undang-Undang TPE, Undang-Undang Narkotika).<sup>15)</sup>

Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi/badan hukum terdapat suatu kasus sebagai bahan kajian yang menimbulkan perbedaan pendapat antara **Soeprapto** dan **Roeslan Saleh** sebagai berikut :

Seorang manager dari satu perusahaan menjual suatu jenis barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga tertinggi yang diperkenankan oleh Pemerintah. Menaikkan harga terlarang itu tidak

---

<sup>15)</sup> Ibid. h 136

sepengetahuan Direktur PT dan jika mengetahui pasti akan menggagalkan.<sup>16)</sup>

Menanggapi hal tersebut diatas, **Soeprapto** pada intinya sependapat bahwa tidaklah mungkin badan hukum dipertanggungjawabkan juga atas perbuatan orang lain (manager) yang dilakukan dengan sengaja. Hal ini dikarenakan dalam badan hukum tersebut tidak ada unsur kesengajaan. Dengan tidak adanya unsur kesengajaan pada PT (badan hukum) itu dikonstruksikan pada tidak adanya kesengajaan pada diri Direktur PT.

Pendapat tersebut juga berlaku dalam hal si pelaku adalah orang yang tidak ada hubungan kerja dengan badan hukum tersebut tetapi berdasarkan “hubungan lain”. Sehubungan dengan hal ini **Soeprapto** berpendapat apabila badan hukum tersebut harus pula bertanggungjawab atas perbuatan seseorang yang melakukan perwakilan untuknya seperti tersebut diatas maka pertanggungjawaban tersebut terlalu luas. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkannya suatu badan hukum, prinsip atau asas kesalahan tetap tidak dapat ditinggalkan.

Sedangkan **Roeslan Saleh** berpendapat bahwa terhadap kasus diatas beliau meninjaunya dari konsepsi dualistis yang memisahkan antara “perbuatan pidana” dengan “pertanggungjawaban pidana”. Mengenai masalah perbuatannya dibahas di bawah judul “Tentang Penyertaan”, sedangkan

---

<sup>16)</sup> Ibid. h. 138

mengenai pertanggungjawaban pidana dibahas di bawah judul “Tentang Kesalahan”.<sup>17)</sup>

## 2. Kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana

Pada umumnya pembuat undang-undang menetapkan badan hukum sebagai subjek tindak pidana dengan rumusan sebagai berikut : ”Jika suatu tindakan pidana.....dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum.....dst. Perumusan demikian terlihat misalnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.

Sehubungan dengan rumusan tersebut diatas, **Barda Nawawi Arief**<sup>18)</sup> menjelaskan bahwa perumusan demikian kurang jelas karena tidak menentukan secara pasti kapan suatu badan hukum dapat dinyatakan sebagai pembuat atau telah melakukan suatu tindak pidana. Demikian pula tidak jelas kapan suatu tindak pidana itu dikatakan telah dilakukan “atas nama suatu badan hukum”.

Sebagaimana dicontohkan oleh **Barda Nawawi Arief** yaitu dalam Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi dan Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Subversi (yang sekarang sudah dicabut) terdapat perumusan yang “seolah-olah” menjelaskan kapan suatu badan hukum itu dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana. Adapun perumusan tersebut berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>17)</sup> *Ibid.* h. 139

<sup>18)</sup> *Ibid.* h 134



Suatu tindak pidana....dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum,....jika tindakan itu dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum,.....<sup>19)</sup>

Berdasarkan bunyi rumusan di atas, kata-kata “dilakukan juga” menunjukkan hanya merupakan fiksi yang memperluas bentuk tindak pidana yang sebenarnya tidak dilakukan oleh badan hukum. Oleh karena itu perumusan di atas tidaklah menjelaskan pengertian kapan badan hukum itu dikatakan melakukan (sebagai pembuat) tindak pidana.<sup>20)</sup>

Selanjutnya apabila perumusan itu dilakukan untuk menjelaskan hal tersebut maka seyogyanya menggunakan rumusan sebagai berikut ; “suatu tindak pidana.....dilakukan oleh badan hukum atau atas nama badan hukum, apabila....(misalnya : dilakukan oleh pengurus, salah seorang anggota pengurus atau atas nama pengurus/anggota pengurus atau menurut ketentuan yang berlaku pada badan hukum yang bersangkutan.<sup>21)</sup>

### 3. Dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (Belanda : *Geen Straf Zonder Schuld*, Jerman : *Keine straf ohne schuld*, Inggris dikenal dalam bahasa latin : *Actus non facit reum, nisi mens sit rea* atau *An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*). Asas ini merupakan asas yang ada dalam hukum yang tidak tertulis.<sup>22)</sup>

<sup>19)</sup> *Ibid.* h. 134-135

<sup>20)</sup> *Ibid.*

<sup>21)</sup> *Ibid.*

<sup>22)</sup> Moeljatno, 1980, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Liberty, h. 3-4.

Menurut **E. Ph. R. Sutorius**<sup>23)</sup> adagium “tiada pidana tanpa kesalahan” dalam hukum pidana lazimnya dipakai dalam arti tiada pidana tanpa kesalahan subjektif atau kesalahan tanpa dapat dicela. Asas kesalahan merupakan asas fundamental dalam hukum pidana. Demikian fundamentalnya sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dan penting dalam hukum pidana. Dari semua syarat dapat dipidana, inilah yang paling langsung berhubungan dengan pidana. Asas ini pun diterima juga terhadap pelaku pelanggaran itu dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 14-2-1916, N.J. 1916, 684 yang terkenal dengan *Arrest Susu*, meskipun *Hoge Raad* mengartikan kesalahan dalam arti sempit sebagai kesengajaan/kealpaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, asas kesalahan merupakan asas yang paling mutlak ada dalam hukum pidana yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah bagaimanakah asas kesalahan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi ?

Menurut **Van Bemmelen** dan **Remmelink**<sup>24)</sup> sehubungan dengan kesalahan yang terdapat pada korporasi mengatakan bahwa : pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum itu, jika mungkin sebagai kesengajaan bersyarat

---

<sup>23)</sup> Dalam JE Sahetapy, 1995, *Op. Cit.*, h. 82-83.

<sup>24)</sup> J.M. Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material bagian Umum*, Bandung : Binacipta, h. 236.

dan kesalahan ringan dari setiap orang yang bertindak untuk korporasi itu jika dikumpulkan akan dapat merupakan kesalahan besar dari korporasi itu sendiri.

Sedangkan **Soeprapto** berpendapat bahwa korporasi dapat memiliki kesalahan apabila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya. Kesalahan itu tidak bersifat individuil karena badan sebagai suatu kolektivitet. Dapatlah kiranya kesalahan itu disebut kesalahan kolektif yang dapat dibebankan kepada pengurusnya. Selain itu cukup alasan untuk menganggap badan hukum mempunyai kesalahan dan karena itu harus menanggungnya dengan kekayaannya, karena ia misalnya menerima keuntungan yang terlarang.<sup>25)</sup>

Dengan demikian **Van Bemmelen**, **Remmelink** dan **Soeprapto** berpendapat bahwa badan hukum/korporasi tetap dapat mempunyai kesalahan dengan konstruksi bahwa kesalahan tersebut terdapat pada pengurus atau anggota direksi. Dengan konstruksi demikian maka asas “tiada pidana tanpa kesalahan” tetap berlaku sepanjang dilakukan oleh pengurus (orang).

#### 4. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan/dikenakan untuk korporasi

Penggunaan sanksi pidana dalam masalah-masalah sosial mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Adapun penggunaan sanksi pidana selama ini pada umumnya ditujukan kepada kepentingan yang berupa nyawa, kemerdekaan/kebebasan atau harta benda manusia.<sup>26)</sup>

<sup>25)</sup> Dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung : STHB, h. 83.

<sup>26)</sup> Muladi dan Barda Nawawi, Arief, *Op. Cit.* h. 132.

Sehubungan dengan adanya keterbatasan-keterbatasan sanksi pidana dalam menanggulangi masalah sosial tersebut **Barda Nawawi Arief**<sup>27)</sup> mengungkapkan bahwa pada hakekatnya keterbatasan-keterbatasan sanksi pidana itu selalu ada. Yang menjadi masalah adalah memilih dan menetapkan pidana adalah yang paling tepat. Sebagaimana diungkapkan oleh Bentham *"punishment ought not to be inflicted if it is groundless, needless, unprofitable or inefficacious"*. Oleh karena itu perlu dipikirkan alternatif pidana lain yang lebih sesuai dengan hakikat permasalahannya. Dengan mengamati masalah-masalah yang berhubungan dengan badan hukum, diperkirakan lebih dekat dengan masalah-masalah perekonomian karena sesuai dengan perkembangan masyarakat/modernisasi itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dipikirkan lebih lanjut alternatif sanksi pidana yang lebih tepat diterapkan/dijatuhkan kepada Korporasi. Hal ini dikarenakan sanksi tindakan yang berupa penghentian kegiatan perusahaan dan yang sejenisnya akan berakibat lebih besar kepada para karyawan dari pada pengusaha.

### **C. Ruang Lingkup TPLH Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia**

Pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup (selanjutnya disingkat TPLH) tersebar di dalam perundang-undangan sebagai berikut :<sup>28)</sup>

---

<sup>27)</sup> *Ibid.*

<sup>28)</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, **Masalah Penegakan Huk Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan** Bandung : Citra Aditya Bakti, h. 83-87.

1. Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Disingkat UUPH) terdapat antara lain dalam :

a. KUHP antara lain terdapat dalam :

- Pasal 187 – 188 : menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir ;
- Pasal 191 : menghancurkan (dsb) bangunan untuk menahan atau menyalurkan air ;
- Pasal 202 : memasukkan barang sesuatu (yang berbahaya) ke dalam sumber-sumber air untuk umum ;
- Pasal 497 : menyalakan api di jalan umum yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran ;
- Pasal 500 : membuat obat ledak tanpa izin ;
- Pasal 501 : menjual (dsb) barang-barang/minuman yang dipalsukan, busuk atau berasal dari ternak sakit ;
- Pasal 505 : berburu di hutan tanpa izin ;
- Pasal 503 : membuat gaduh / berisik tetangga di waktu malam atau dekat dengan bangunan ibadah ;

- Pasal 548 – 549 : membiarkan unggas ternak berjalan di kebun / tanah benihan.
- b. *Natuurmonumenten Ordonnantie* (Ordonansi Cagar Alam) S. 1916 No. 278 yang bertujuan melindungi flora dan fauna. Ordonansi ini kemudian diganti dengan *Natuur-monumenten en Wildreservatenordonnantie* (Ordonansi Cagar-cagar Alam dan Suaka-suaka Margasatwa) S. 1932 No. 17. Ordonansi inipun kemudian dicabut dengan Ordonansi Perlindungan Alam (*Natuurbeschermingsordonnantie*) S. 1941 : 167 yang inipun dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (UU Konservasi Hayati).
- c. *Reeden Reglement*/Peraturan bandar 1925 yang melarang membuang barang-barang di bandar, sepanjang pantai dan alur-alur pelayaran lainnya (Pasal 16).
- d. *Hindeordonantie* (S. 1926 No. 226) yang mengatur pendirian bangunan/instalasi yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan/gangguan (*hinder*).
- e. *Monumentenordonnantie* (S. 1931 No. 238) dalam Pasal 12 antara lain mengancam pidana perbuatan merusak/mengubah bentuk atau tujuan semula dari monumen tanpa izin (melanggar pasal 6 ayat 2). Ordonansi ini telah dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

- f. *Jachtordonantie*/Ordonansi Perburuan (S. 1931:133) dan *Jachtverordening* (S. 1931 : 265) yang melarang perburuan tanpa izin (Pasal 1 Jo. 11 S. 1931 : 133). Ordonansi Perburuan 1931 ini kemudian dicabut oleh Ordonansi Perburuan 1940. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (Pasal 43), Ordonansi Perburuan inipun sudah dinyatakan tidak berlaku lagi.
- g. Di dalam *Dierenbeschermingsordonnantie* (Ordonansi Perlindungan Binatang-Binatang Liar) S. 1931 No. 134 antara lain dilarang berburu binatang-binatang yang dilindungi dan memperniagakannya (hidup/mati) atau mengeluarkannya dari pelabuhan Indonesia ke tempat lain (di dalam/luar Indonesia). Ordonansi ini sudah dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (Pasal 43).
- h. Dalam *Wegverkeersverordening*/Peraturan Lalu Lintas Jalan (S. 1936 : 451 jo. PP No. 2/1964), antara lain dinyatakan :
- Dilarang mengeluarkan suara keras, menyebarkan uap atau bahan-bahan lain (Pasal 11 sub 4 a) ;
  - Kendaraan bermotor harus dengan alat peredam suara (Pasal 24 ayat 1 c).
- i. Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) dalam Pasal 15 mengatur kewajiban memelihara tanah (termasuk kesuburannya dan mencegah kerusakannya) dan dalam Pasal 52 ayat (1) mengatur sanksi pidananya.

- j. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk usaha-usaha bagi umum, antara lain mengancam pidana terhadap usaha-usaha hygiene untuk umum yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan menurut peraturan yang berlaku (pasal 9).
- k. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan, dalam Pasal 19-nya memberikan dasar kepada peraturan pelaksana untuk memuat sanksi pidana. Selanjutnya dalam Pasal 18 PP Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan ditentukan ancaman Pidana untuk perbuatan-perbuatan, antara lain :
- Memotong, merusak dsb. tanda batas kawasan hutan (Pasal 4 ayat 2) ;
  - Menggunakan kawasan hutan tanpa izin (Pasal 5 ayat 2) ;
  - Eksplorasi dan eksploitasi dalam kawasan hutan tanpa izin atau tidak sesuai dengan petunjuk yang berwenang (Pasal 7) ;
  - Mengambil/memungut hasil hutan tanpa izin (Pasal 9 ayat 3) ;
  - Menggembalakan ternak dalam hutan (Pasal 11 ayat 1) ;
  - Menguasai/mengangkut hasil hutan tanpa surat keterangan yang sah (Pasal 14 ayat 1).
- l. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dalam Bab XI (Pasal 31-34) mengancam pidana terhadap perbuatan-perbuatan :
- Melakukan usaha pertambangan tidak sesuai dengan undang-undang ;
  - Merintangi usaha pertambangan yang sah.



- m. Peraturan Menteri Pertambangan No.4/PM/Pertambangan/1973 mengatur tentang pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Perairan Dalam Kegiatan Eksplorasi dan atau Eksploitasi Minyak Gas Dan Bumi ;
  - n. Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia mengancam pidana antara lain terhadap orang yang melakukan eksplorasi/eksploitasi/penelitian sumber-sumber kekayaan alam Landas Kontinen Indonesia yang tidak mengambil langkah-langkah pencegahan terjadinya pencemaran air laut dan udara di atasnya (Pasal 11) ;
  - o. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dalam Pasal 15 mengancam pidana antara lain terhadap barang siapa yang melakukan penguasaan air/sumber air tidak sesuai dengan undang-undang dan tidak melakukan pencegahan (sengaja/lalai) terjadinya pengotoran air (melanggar Pasal 8, 11 dan 13).
2. Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada tahun 1982 keluar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan undang-undang induk atau undang-undang payung (*kader-wet* atau *umbrella act*) di bidang lingkungan hidup. Dalam perkembangan selanjutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Di samping undang-undang induk tersebut ada pula perundang-undangan lingkungan sektoral yang antara lain diatur dalam :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU Konservasi Hayati) ;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya ;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

Selanjutnya ruang lingkup TPLH dalam perundang-undangan tersebut di atas sebagai berikut<sup>29)</sup> :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)

TPLH menurut UUPLH dirumuskan dalam empat pasal sebagai berikut :

a. Pasal 41

- (1) Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

---

<sup>29)</sup> *Ibid.* h. 87-104

tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut ada dua TPLH, yaitu :

1. Pencemaran lingkungan hidup (*environmental pollution*)
2. Perusakan lingkungan hidup (*environmental damage*)

Selanjutnya unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dikatakan telah terjadi “pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup” dirumuskan dalam ketentuan umum sebagai berikut :

#### Pasal 1 ke-12

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

#### Pasal 1 ke-14

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan pengertian/perumusan di atas maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

Pencemaran lingkungan hidup (*Environmental Pollution*) menurut

Pasal 1 ke-12 unsur-unsurnya meliputi :

1. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia ;

2. sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Perusakan lingkungan hidup (*Environmental Damage*) menurut Pasal 1 ke 14 unsur-unsurnya meliputi :

1. tindakan ;
2. yang menimbulkan perubahan (langsung/tidak langsung) terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya ;
3. yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

b. Pasal 42

- (1) Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam pidana paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

TPLH dalam Pasal 42 ayat (1) merupakan delik culpa. Apabila dikaitkan dengan Pasal 48 maka delik culpa tersebut dinyatakan sebagai kejahatan dan berdasarkan Pasal 42 ayat (2) ancaman pidananya dirumuskan dengan sistem kumulatif.

## c. Pasal 43

- (1) Barangsiapa yang dengan melanggar perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barangsiapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 43 ayat (1) adalah :

1. a. melepaskan atau membuang zat/energi/komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam udara atau air permukaan ;
- b. melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan barang tersebut ;
- c. menjalankan instalasi yang berbahaya.
2. Perbuatan tersebut pada no. 1 dilakukan dengan :
  - Melanggar perundang-undangan yang berlaku ;
  - Sengaja ;

- Mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam ayat (2) adalah :

1. sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ;
2. padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

TPLH dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) di atas diancam dengan pidana yang sama yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda 300 juta rupiah. Ancaman pidana ini menurut ayat (3) dapat diperberat menjadi pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak 450 juta rupiah, apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat.

d. Pasal 44

- (1) Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana

diancam pidana paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

TPLH dalam Pasal di atas merupakan delik culpa terhadap delik yang dirumuskan dalam Pasal 43. Ancaman pidananya berupa pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah (ayat 1) dan dapat diperberat menjadi pidana penjara 5 tahun dan denda 150 juta rupiah, apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat (ayat 2).

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

Perbuatan yang dapat dipidana menurut undang-undang ini diatur dalam Pasal 16 s/d 18 sebagai berikut :

- a. Menurut Pasal 16 ayat 1, dipidana dengan denda maksimum 225 juta rupiah, barangsiapa melanggar :
  - Pasal 5 ayat 1 yaitu melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di ZEE tanpa izin ;
  - Pasal 6, yaitu membuat atau menggunakan pulau-pulau buatan atau instalasi atau bangunan lainnya di ZEEI tanpa izin ;
  - Pasal 7, yaitu melakukan kegiatan penelitian ilmiah di ZEEI tanpa persetujuan Pemerintah RI.
- b. Menurut Pasal 16 ayat 3, mereka yang sengaja melakukan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan di dalam ZEEI diancam pidana

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.

- c. Menurut Pasal 17, mereka yang merusak / memusnahkan barang-barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana menurut Pasal 16 ayat 1 di atas, dipidana dengan denda maksimum 75 juta rupiah.
  - d. Semua tindak pidana dalam Pasal 16 dan 17 di atas, menurut Pasal 18 dinyatakan sebagai “kejahatan”.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
- Perbuatan yang dapat dipidana menurut undang-undang ini di atur dalam Pasal 24 s/d Pasal 28.
- a. Menurut Pasal 24 ayat 1 : dipidana dengan penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimum 25 juta rupiah dengan pidana tambahan pencabutan Izin Usaha Industri (IUI), barangsiapa dengan sengaja melanggar :
    - Pasal 13 ayat 1, yaitu mendirikan perusahaan industri baru atau perluasan tanpa memperoleh IUI ;
    - Pasal 15 ayat 1, yaitu tidak menyampaikan informasi industri secara berkala (mengenai kegiatan dan hasil produksinya kepada Pemerintah).



- b. Menurut Pasal 24 ayat 2 : apabila tindak pidana dalam pasal 24 ayat 1 di atas dilakukan karena kelalaian atau kealpaan dipidana dengan pidana kurungan maksimum 1 (satu) tahun atau denda maksimum satu juta rupiah dan pidana tambahan pencabutan IUI.
- c. Menurut Pasal 25 : dipidana penjara maksimum 2 tahun atau denda maksimum 10 juta rupiah, barangsiapa dengan sengaja tanpa hak melakukan peniruan desain produk industri.
- d. Menurut Pasal 26, dipidana dengan penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimum 25 juta rupiah dan dipidana tambahan pencabutan IUI, barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19 (yaitu melanggar ketentuan Pemerintah mengenai standar bahan baku barang hasil industri).
- e. Menurut Pasal 27 ayat 1, diancam dengan pidana penjara maksimum 10 Tahun dan/atau denda maksimum 100 juta rupiah, barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 21 ayat 1. Menurut Pasal 21 ayat 1, perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya akibat kegiatan industri yang dilakukannya.
- f. Menurut Pasal 27 ayat 2, tindak pidana dalam Pasal 27 ayat 1 di atas dipidana dengan pidana kurungan maksimum 1 (satu) tahun dan/atau denda maksimum 1 (satu) juta rupiah, apabila dilakukan karena kelalaian.

- g. Menurut Pasal 28 ayat 1, tindak pidana dalam Pasal 24 ayat 1, 25, 26 dan 27 ayat 1 merupakan “kejahatan” sedangkan yang diatur dalam Pasal 24 ayat 2 dan Pasal 27 ayat 2 merupakan “pelanggaran”.

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

Perbuatan yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 24 s/d 28 sebagai berikut :

- a. Menurut Pasal 24, dipidana dengan pidana penjara maksimum 10 tahun dan/atau denda maksimum 100 juta rupiah, barangsiapa melanggar Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 1.
- Pasal 6 ayat 1 : melarang tiap orang/badan hukum melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
  - Pengertian “pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya” dirumuskan dalam Pasal 1 ke 13 s/d 16.
  - Menurut Pasal 24, pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 1 harus dilakukan dalam wilayah perikanan RI menurut Pasal 2 huruf a (yaitu di Perairan Indonesia) dan huruf b (yaitu di sungai, danau, waduk, rawa, genangan air lainnya di wilayah Indonesia).  
Jadi tidak dalam wilayah ZEEI.

- b. Menurut Pasal 25, barangsiapa melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 10 (baik orang maupun badan hukum) dipidana dengan :
  - a. pidana penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimum 50 juta rupiah, apabila menggunakan kapal bermotor 30 gros ton atau lebih.
  - b. penjara maksimum 2 Tahun 6 bulan atau denda maksimum 25 juta rupiah, apabila menggunakan kapal bermotor berukuran kurang dari 30 gros ton.
- c. Pasal 26 ; mengancam pidana terhadap barangsiapa (orang/badan hukum) yang melakukan usaha perikanan dibidang pembudidayaan ikan tanpa izin sebagaimana di ataur dalam Pasal 10, dengan pidana kurungan maksimum 6 bulan atau denda 5 juta rupiah.
- d. Pasal 27 ayat 1 ; mengancam dengan pidana denda maksimum 25 juta rupiah terhadap barangsiapa melanggar Pasal 4 (yaitu melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan yang tidak memenuhi ketentuan Menteri)
- e. Pasal 27 ayat 2 ; mengancam dengan denda maksimum 5 juta kepada barangsiapa melanggar Pasal 20 (yaitu melanggar ketetapan menteri mengenai larangan mengeluarkan atau memasukkan jenis ikan tertentu).

- f. Menurut Pasal 28 ayat 1 ; tindak pidana pasal 24 dan 25 (sub a dan b di atas) merupakan “kejahatan” dan menurut Pasal 28 ayat 2 tindak pidana dalam Pasal 26 dan 27 (sub c, d, a di atas) merupakan “pelanggaran”.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya” (disebut Undang-Undang Konservasi Hayati)
- Perbuatan yang dapat dipidana diatur dalam Pasal 40 yang singkatnya sebagai berikut :
- Ayat (1) : Sengaja melanggar Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) diancam pidana penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum 200 juta rupiah.

Adapun bunyi Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) sebagai berikut :

- Pasal 19 ayat (1) : “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan suaka alam”.
- Menurut “Penjelasan”, yang dimaksud dengan “perubahan terhadap keutuhan suaka alam” adalah “melakukan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, perburuan satwa yang berada dalam kawasan dan memasukkan yang bukan jenis asli”.
- Pasal 33 ayat (1) ; “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional”.

Menurut “Penjelasan” yang dimaksud dengan zona inti adalah bagian dari kawasan Taman Nasional yang mutlak dilindungi dan tidak adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia. Penjelasan Pasal 33 ayat 1 juga menunjuk Penjelasan Pasal 19 ayat 1 di atas.

Ayat (2) ; Sengaja melanggar Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) diancam pidana penjara maksimum 5 tahun dan denda maksimum 100 juta rupiah.

Sedangkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 21 ayat (1) :

Setiap orang dilarang untuk :

- a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati ;
- b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam kawasan hidup atau mati dari suatu di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

- Pasal 21 ayat 2 :

Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ;

- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati ;
- b. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia ;
- c. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh dan/atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia ;
- d. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

- Pasal 33 ayat 3 :

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.

Penjelasan :

Menurut Pasal 29 ayat 1 Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (THR), dan Taman Wisata Alam (TWA) merupakan “kawasan pelestarian alam” (KPA). Adapun fungsi KPA menurut Pasal 30 adalah :

- a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa;
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 32 disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan zona pemanfaatan adalah bagian dari kawasan Taman Nasional yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata; dan yang dimaksud dengan zona lain adalah zona di luar kedua zona tersebut karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona rimba, zona pemanfaatan tradisional, zona rehabilitasi dsb.

Ayat (3) :

Apabila ketentuan ayat (1) dilakukan karena kelalaian dipidana dengan pidana kurungan maksimum 1 (satu) tahun dan denda maksimum 100 juta rupiah.

Ayat (4) :

Apabila ketentuan ayat (2) dilakukan karena kelalaian, dipidana dengan kurungan maksimum 1 tahun dan denda maksimum 50 juta rupiah.

Ayat 5 :

Delik dalam ayat (1) dan (2) adalah “kejahatan” dan delik dalam ayat 3 dan 4 adalah “pelanggaran”.

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang “ Benda Cagar Budaya “

Perbuatan yang dapat dipidana dalam Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 26 s/d 29 sebagai berikut :

- a. Pasal 26 ; mengancam dengan pidana maksimum 10 tahun penjara dan/atau denda maksimum 100 juta rupiah terhadap barangsiapa sengaja :

- merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1.
- b. Pasal 27 mengancam dengan pidana penjara maksimum 5 tahun dan/atau denda maksimum 50 juta rupiah, terhadap barangsiapa dengan sengaja :
  - melakukan pencarian benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan atau dengan cara pencarian lainnya tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1
- c. Pasal 28 mengancam pidana kurungan maksimum 1 (satu) tahun dan/atau denda maksimum 10 juta rupiah terhadap barang siapa dengan sengaja :
  - tidak melakukan kewajiban mendaftarkan pemilikan, pengalihan hak dan pemindahan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 ;
  - tidak melakukan kewajiban melapor atas hilang dan/atau rusaknya benda cagar budaya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ;
  - tidak melakukan kewajiban melapor atas penemuan atau mengetahui ditemukannya benda cagar budaya atau benda yang diduga sebagai benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 ;



- memanfaatkan kembali benda cagar budaya yang sudah tidak dimanfaatkan lagi seperti fungsi yang semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ;
- memanfaatkan benda cagar budaya dengan cara penggandaan tidak seizin Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ;

d. Menurut Pasal 29 , tindakan pidana dalam Pasal 26 dan 27 adalah “kejahatan” dan tindak pidana dalam Pasal 28 adalah “pelanggaran”.

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

Di dalam undang-undang ini, tindak pidana yang berhubungan dengan masalah lingkungan tersebut dalam perumusan pasal-pasal sebagai berikut :

- a. Pasal 119 ayat (1) : mengancam dengan pidana maksimum 5 tahun penjara atau denda 120 juta rupiah, kepada barangsiapa melakukan :
- pembuangan limbah atau bahan lain dari kapal yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1).

Dalam Pasal 65 ayat (1) dinyatakan :

“Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah atau bahan lain apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan”.

- b. Pasal 119 ayat (2) mengancam dengan pidana maksimum 10 tahun penjara atau denda 240 juta rupiah apabila tindak pidana dalam ayat 1 diatas mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup.

c. Pasal 120 mengancam dengan pidana maksimum 2 tahun penjara atau denda 48 juta rupiah terhadap :

- nakhoda atau pemimpin kapal yang tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan penanggulangan pencemaran yang bersumber dari kapalnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1)

Dalam Pasal 67 ayat 1 ditegaskan :

“Setiap nakhoda atau pemimpin kapal wajib menanggulangi pencemaran yang bersumber dari kapalnya.

Ketiga TPLH diatas, menurut Pasal 129 dinyatakan sebagai “kejahatan”.

**RUANG LINGKUP TPLH DALAM  
PERUNDANG - UNDANGAN LINGKUNGAN HIDUP  
DI INDONESIA**

No.	Undang-Undang	Rmsn Pasal	Jenis ancaman pidana	Jml. Ancaman pidana	Kualifikasi tindak pidana	Keterangan
1.	UU 23/1997 (Penge- lolaan Lingkungan Hidup	P.41 ayat 1	Penjara dan denda	10 tahun dan denda max.Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	Kejahatan	
		Ayat 2	Penjara dan denda	15 tahun dan denda max. Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)	Kejahatan	Akibat mati atau luka berat
		P. 42 ayat 1	Penjara dan denda	3 tahun dan max. Rp. 100.000.000,- (sratus juta rupiah)	Kejahatan	Kealpaan
		Ayat 2	Penjara dan denda	5 tahun atau denda max Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)	Kejahatan	Akibat mati atau luka berat
		P. 43 ayat 1	Penjara dan denda	6 tahun dan denda max Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)	Kejahatan	-
		Ayat 2	Penjara dan denda	6 tahun dan denda max Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)	Kajahatan	-
		Ayat 3	Penjara dan denda	9 tahun dan denda max Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah)	Kejahatan	Akibat mati atau luka berat
		P. 44 ayat 1	Penjara dan denda	3 tahun dan denda max.Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)	Kejahatan	Kealpaan
		Ayat 2	Penjara dan denda	5 tahun dan denda max.Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)	Kejahatan	Akibat orang mati atau luka berat
		P. 46 ayat 1	Sanksi pidana serta tindakan tata tertib	Pidana denda diperberat 1/3	Kejahatan	Badan hukum perseroan, perse rikatan, yayasan atau organisasi lain
		Ayat 2	Sanksi pidana serta tindakan tata tertib	Pidana denda di perberat 1/3	Kejahatan	Dasar hubungan kerja atau hubu- ngan lain
		Ayat 3	Sanksi pidana serta tindakan tata tertib	Pidana denda di perberat 1/3	Kejahatan	Panggilan pada pengurus ditem- pat tinggal atau tempat melaku- kan pekerjaan
2.	UU 5/1983 (Zona ekonomi Eksklusif Indonesia)	P. 16 ayat 1	Denda	Max Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)	Kejahatan	Melanggar pasal 5 ayat 1, 6, 7
		Ayat 3	Berdasarkan UU lingkungan yang berlaku	Berdasarkan UU lingkungan yang berlaku	Kejahatan	Sengaja

		P.17	Denda	Max Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)	Kejahatan	Merusak/memusnahkan barang bukti.
3.	UU 5/1984 (Perindustrian)	P. 24 ayat 1	Penjara atau denda + pencabutan Izin Usaha Industri (IUI)	Max. 5 tahun atau denda max Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)	Kejahatan	Melanggar Pasal 13 ayat 1 dan pasal 14 ayat 1
		Ayat 2	Kurungan atau denda + pencabutan IUI	Kurungan max 1 tahun atau denda max Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)	Pelanggaran	Kelalaian melanggar Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 14 ayat 1
		P. 25	Penjara atau denda	Penjara max 2 tahun atau denda max Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)	Kejahatan	Sengaja tanpa hak melaksanakan peniruan desain produk industri
		P. 26	Penjara atau denda + Pencabutan IUI	Penjara max 5 tahun atau denda max Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)	Kejahatan	Melanggar pasal 19
		P. 27 ayat 1	Penjara dan/atau denda	Penjara max 10 tahun dan/atau denda max Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)	Kejahatan	Melanggar Pasal 21 ayat 1 (sengaja)
		Ayat 2	Kurungan dan/atau denda	Max. 1 tahun dan/atau denda max Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)	Pelanggaran	Melanggar Ps. 21 ayat 1 (kelalaian)
4.	UU 9/85 (Perikanan)	P. 24	Penjara dan/atau denda	Penjara max. 10 tahun dan/atau denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)	Kejahatan	Melanggar Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1)
		P. 25	a. Penjara atau denda	Max 5 tahun atau denda max Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	Kejahatan	Menggunakan kapal bermotor > 30 gros ton
			b. Penjara atau denda	Max 2 tahun 6 bulan atau denda max Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)	Kejahatan	Menggunakan kapal bermotor > 30 gros ton
		P. 26	Kurungan atau denda	Max 6 bulan atau Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)	Pelanggaran	Melanggar Pasal 10
		Ps. 27 ayat 1	Denda	Max Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)	Pelanggaran	Melanggar Pasal 4
		Ayat 2	Denda	Max Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)	Pelanggaran	Melanggar Pasal 20
5.	UU 5/1990 (Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya)	P. 40 ayat 1	Penjara dan denda	Max. 10 tahun dan denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)	Kejahatan	Melanggar Ps. 19 dan Ps. 33 ayat 1
		Ayat 2	Penjara dan denda	Max. 5 tahun dan denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)	Kejahatan	Melanggar Pasal 21 (1) dan (2) serta Pasal 33 ayat 3
		Ayat 3	Kurungan dan denda	Max 1 tahun dan denda max Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)	Pelanggaran	Kelalaian melanggar Ps. 19 ayat 1 dan Ps. 32 ayat 1

		Ayat 4	Kurungan dan denda	Max 1 tahun dan denda max Rp. 50.000.000 (lima juta rupiah)	Pelanggaran	Kelalaian melanggar Ps. 21 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 33 ayat 3
6.	UU 5/1992 (Benda Cagar Budaya)	P. 26	Penjara dan/atau denda	Max 10 tahun dan/atau max Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)	Kejahatan	Melanggar Ps. 15 ayat 1 dan ayat 2
		P. 27	Penjara dan/atau denda	Max 5 tahun dan/atau denda max Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	Kejahatan	Melanggar pasal 12 ayat 1
		P. 28	Kurungan dan/atau denda	Max 1 tahun dan/atau max Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)	Pelanggaran	Melanggar pasal 8 ayat 1 pasal 9 Pasal 10 ayat 1 Pasal 21 Pasal 23
7.	UU 21/1992 (Pelayaran)	P. 119 ayat 1	Penjara atau denda	Max 5 tahun atau denda Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)	Kejahatan	Melanggar Pasal 65 ayat 1
		Ayat 2	Penjara atau denda	Max 10 tahun atau denda Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah)	Kejahatan	Akibat rusaknya atau tercemarnya lingkungan hidup
		P. 120	Penjara atau denda	Max 2 tahun atau denda Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah)	Kejahatan	Melanggar pasal 67 ayat 1 bagi Nakhoda atau pemimpin kapal

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

##### **A. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Perundang-undangan Lingkungan Hidup Saat Ini**

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II bahwa sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam TPLH tidak dapat dilepaskan dari kebijakan legislatif yang tertuang dalam perundang-undangan tentang lingkungan hidup.

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kebijakan perundang-undangan lingkungan hidup saat ini berorientasi pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) sebagai undang-undang induk (*kader wet* atau *umbrella act*) dan perundang-undangan lingkungan hidup sektoral.

Adapun sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kebijakan perundang-undangan lingkungan hidup yang saat ini berlaku akan diuraikan meliputi sebagai berikut : 1. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, 2. Kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana, 3. Dalam hal bagaimana korporasi

dapat dipertanggungjawabkan dan 4. Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan untuk korporasi.<sup>1)</sup>

### 1. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan

Apabila melihat rumusan TPLH dalam UUPLH selalu diawali dengan kata-kata “Barangsiapa” yang menunjuk pada pengertian orang. Namun apabila melihat pada ketentuan Pasal 1 sub 24 disebutkan bahwa yang dimaksud orang adalah perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum. Hal ini dipertegas dengan adanya rumusan dalam Bab IX tentang Ketentuan Pidana yaitu dalam Pasal 45 dan Pasal 46 UUPLH yang mengatur tentang pertanggungjawaban badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain. Dengan adanya rumusan pasal tersebut maka orang dan korporasi (badan hukum dsb) merupakan subjek tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau

---

<sup>1)</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, h, 156

organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain dan dilakukan oleh orang-orang baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.
- (3) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-panggilan itu ditunjukkan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 di atas maka pertanggungjawaban pidana korporasi dikenakan kepada :

- a. Badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut;
- b. Mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau;
- c. Kedua-duanya ( a dan b ).

Sedangkan badan hukum sebagai subjek hukum pidana dalam perundang-undangan sektoral dirumuskan secara eksplisit dan secara implisit<sup>2)</sup>. Perumusan secara eksplisit terdapat antara lain dalam :

Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>2)</sup> *Ibid* . h. 106



Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pasal 7 ayat 1 UU Perikanan berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Pasal 10 ayat 1 UU Perikanan berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan diwajibkan memiliki izin usaha perikanan.

Adapun perumusan secara implisit badan hukum sebagai subjek hukum pidana terdapat antara lain dalam :

Pasal 1 ke-7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yang berbunyi : Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri.

Pasal 21 ayat (1) berbunyi :

Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 1 ke-7 tersebut diatas maka Perusahaan industri dikatakan sebagai pelaku tindak pidana.

## 2. Kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana

Pada umumnya pembuat undang-undang menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dengan rumusan sebagai berikut : Jika tindak

pidana dilakukan oleh korporasi ....dst. Perumusan ini bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 59 ayat (3), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Pasal 78 ayat (4). Tetapi dalam rumusan undang-undang tersebut tidak secara jelas menentukan kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana.

Sedangkan penentuan kapan korporasi dikatakan melakukan TPLH dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (UUPLH) tercantum dalam Pasal 46 ayat (2) UUPLH yang berbunyi sebagai berikut :

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

Apabila melihat rumusan dalam perundang-undangan sektoral (UU ZEEI, UU Perindustrian, UU Perikanan, UU Konservasi Hayati, UU Benda Cagar Budaya dan UU Pelayaran) tidak terdapat ketentuan yang rinci mengatur tentang penentuan kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana.

### **3. Dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan**

Setelah korporasi/badan hukum dinyatakan telah melakukan tindak pidana, maka permasalahan selanjutnya adalah bagaimanakah menentukan

kesalahan dan pertanggungjawaban badan hukum tersebut. Hal ini dikarenakan dalam menjatuhkan sanksi pidana harus terlebih dahulu menentukan kesalahannya dan kesalahan mana dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum tersebut.

Berdasarkan rumusan TPLH dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan perundang-undangan sektoral lainnya, sebagian besar mencantumkan unsur sengaja atau kealpaan/kelalaian. Ada beberapa undang-undang yang tidak mencantumkan unsur tersebut misalnya dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1993 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Sehubungan dengan tercantumnya unsur sengaja atau kealpaan maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan beberapa perundang-undangan sektoral menganut prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Dengan kata lain undang-undang tersebut menganut asas kesalahan atau asas culpabilitas.

#### **4. Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan untuk korporasi**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (UUPLH) dikenal 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup, yaitu ;

a. Sanksi pidana

Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok yang berupa penjara dan denda. Disamping itu dalam UUPLH juga tidak ada tindak pidana yang diancam dengan pidana kurungan, **Barda Nawawi Arief**<sup>3)</sup> mengungkapkan bahwa hal tersebut dikarenakan semua TPLH menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dikualifikasikan sebagai “kejahatan”.

b. Sanksi “tindakan tata tertib”

Tindakan tata tertib yang dapat dikenakan kepada pelaku TPLH baik orang maupun badan hukum berupa :

1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
2. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
3. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
4. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
5. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau
6. menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama (3) tiga tahun.

Berdasarkan kedua jenis sanksi seperti yang telah diuraikan tersebut di atas maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tidak menyebutkan adanya pidana tambahan. Namun pada hakikatnya bentuk tindakan berupa “perampasan keuntungan” dan “penutupan perusahaan” (Pasal 47 sub a dan sub b) dapat dikelompokkan ke dalam pidana tambahan. Perampasan

---

<sup>3)</sup> *Ibid.* h. 109 - 110

keuntungan dapat dikategorikan sebagai perampasan barang (merupakan salah satu pidana tambahan menurut KUHP). Demikian pula dengan penutupan perusahaan dapat dikategorikan sebagai pencabutan hak. Hal ini dikarenakan penutupan perusahaan dapat mengandung di dalamnya pencabutan hak/izin berusaha.<sup>4)</sup>

Selanjutnya mengenai pemberian ganti rugi juga tidak secara tegas dirumuskan sebagai salah satu jenis sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Namun apabila melihat rumusan Pasal 47 sub c, sub d dan sub a dapat dikatakan merupakan bentuk-bentuk pemberian “*restitusi*” kepada korban.<sup>5)</sup>

Apabila melihat pola jenis sanksi dalam perundang-undangan lingkungan hidup sektoral maka dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Jenis sanksi dalam perundang-undangan lingkungan hidup sektoral mengikuti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 (UULH) yaitu hanya menggunakan 1 (satu) jenis sanksi yaitu sanksi pidana berupa pidana pokok. Hal ini bisa dilihat antara lain dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI (pidana denda), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (pidana penjara atau denda), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (penjara atau denda) dan sebagainya.

---

<sup>4)</sup> *Ibid* . 110 - 111

<sup>5)</sup> *Ibid* .

b. Disamping pidana pokok seperti tersebut di atas, terdapat pula undang-undang sektoral yang mencantumkan pidana tambahan yang antara lain terlihat di dalam :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yaitu dalam Pasal 16 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

Hakim dalam keputusannya dapat menetapkan perampasan terhadap hasil kegiatan, kapal dan/atau alat perlengkapan lainnya yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1).

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yaitu dalam Pasal 24 dan 26 yang berbunyi sebagai berikut : .... dengan hukuman tambahan pencabutan Izin Usaha Industri.

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yaitu dalam Pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut :

Benda-benda yang dipergunakan dalam dan yang dihasilkan dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 dapat dirampas untuk negara.

Sehubungan dengan uraian di atas maka sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kebijakan perundang-undangan lingkungan hidup saat ini (kebijakan faktual) secara ringkas dapat dilihat sebagai berikut :

KEBIJAKAN FAKTUAL PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUNGAN HIDUP		
1.	Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan	
	Undang-Undang 23 / 1997 (UUPLH) - Pasal 46 UUPLH a. Badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain. b. Mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin. c. Kedua-duanya.	UU Sektoral - Tidak ada ketentuan secara rinci
2.	Kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana	
	Undang-Undang 23/1997 (UUPLH) - Pasal 46 Apabila ada orang atau orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja dan dalam lingkungan badan hukum itu melakukan tindak pidana.	UU Sektoral - Tidak ada ketentuan secara rinci
3.	Dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan	
	Undang-Undang 23/1997 (UUPLH) - Menganut prinsip <i>liability based on fault</i> (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan).	UU Sektoral - Menganut prinsip pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan kecuali dalam : - UU 9/1985 (Perikanan) - UU 5/1983 (ZEEI)
4.	Jenis-Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan untuk korporasi	
	Undang-Undang 23/1997 (UUPLH) - 2 (dua) jenis sanksi yaitu : a. sanksi pidana pidana pokok : - penjara - denda b. Sanksi tindakan tata tertib 1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari TP ; dan / atau 2. penutupan perusahaan (seluruhnya/ sebagian) dan / atau 3. Perbaikan akibat TP ; dan / atau 4. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak ; dan / atau 5. Meriadakan apa yang dilalaikan tanpa hak ; dan / atau 6. menempatkan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun	UU Sektoral - Pola jenis sanksi mengacu pada UU 4/1982 (UULH) menggunakan 1 (satu) jenis sanksi yaitu sanksi pidana berupa pidana pokok, (UUZEEI berupa denda, UU Perindustrian berupa penjara atau denda dan sebagainya) - Pidana tambahan a. UU 5/1983 (ZEEI) - perampasan hasil kegiatan, kapal dan/atau alat perlengkapan lain yang digunakan untuk melakukan TP b. UU 5 / 1984 (Perindustrian) - Pencabutan Izin Usaha Industri (IUI) c. UU 9/1985 (Perikanan) - Perampasan benda-benda yang digunakan dan dihasilkan dari delik-delik yang diatur Pasal 24 - Pasal 27.

## **B. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Perundang-undangan Lingkungan Hidup Yang Akan Datang**

Sebagaimana dalam pembicaraan tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kebijakan perundang-undangan lingkungan hidup saat ini (Bagian A) yang telah diuraikan sebelumnya maka sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kebijakan perundang-undangan lingkungan hidup yang akan datang tetap dititikberatkan kepada ke 4 (empat) permasalahan pokok tentang : 1. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, 2. Kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana, 3. Dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan, dan 4. Jenis-jenis sanksi apa yang dapat dijatuhkan untuk korporasi.

Adapun ke 4 (empat) pokok permasalahan tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan**

Sebagaimana diuraikan pada Bagian A bahwa terdapat fenomena lembaga legislatif dalam memformulasikan suatu undang-undang dengan menjadikan badan hukum (korporasi) sebagai subjek tindak pidana. Fenomena ini bisa dilihat antara lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun



1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana (salah satunya dalam UUPLH) sejalan atau sesuai dengan perkembangan dunia Internasional yang menempatkan korporasi sebagai subjek TPLH. Salah satunya adalah *International Meeting Of Experts On The Use Of Criminal Sanction In The Protection Of Environment, Internationally, Domestically and Regionally* (Portland, Oregon, USA, 19 - 23 March 1994).

Menurut pertemuan para pakar internasional ini, nilai atau kepentingan yang perlu dilindungi oleh hukum pidana adalah lingkungan itu sendiri baik berupa *natural environment* maupun *cultural environment*. Selain itu perlindungan terhadap lingkungan ini harus ditempuh secara gabungan antara hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi. Sedangkan dalam menggunakan hukum pidana terhadap TPLH dimungkinkan adanya *Corporate Criminal Responsibility*.<sup>6)</sup>

Mengenai pertanggungjawaban badan hukum (*Legal Entity Liability*)

ditentukan bahwa :

---

<sup>6)</sup> Dalam Barda Nawawi Arief, *International Meeting Of Experts On The Use Of Criminal Sanction In The Protection Of Environment, Internationally, Domestically And Regionally*, Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi di Hotel Siranda, Semarang 3 – 15 Desember 1995.

- a. Delik-delik yang dirumuskan dalam *generic and specific crimes* dapat dipertanggungjawabkan terhadap seseorang individu maupun badan hukum, dengan ketentuan bahwa delik itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi (badan hukum) itu;
- b. Pertanggungjawaban badan hukum terjadi apabila :
  - ada kesalahan manajemen dari badan hukum itu dan telah terjadi *generic crime* atau
  - ada pelanggaran peraturan atau ketentuan undang-undang oleh badan hukum itu;
- c. Pertanggungjawaban badan hukum dikenakan juga pada pertanggungjawaban perorangan dari manajer, petugas, agen, karyawan atau pelayan dari badan hukum itu;
- d. Pertanggungjawaban badan hukum diterapkan tanpa memperhatikan apakah orang/individu yang melakukan perbuatan atas nama badan hukum itu telah diidentifikasi, telah dituntut atau telah dipidana atau tidak;
- e. Semua sanksi kecuali sanksi pidana penjara, dapat dikenakan kepada badan hukum.<sup>7)</sup>

Sehubungan dengan perkembangan Internasional seperti telah diuraikan di atas maka pengaturan tindak pidana lingkungan hidup perlu

---

<sup>7)</sup> *Ibid*

disempurnakan karena sebagaimana diungkapkan **Muladi**<sup>8)</sup> bahwa lingkungan hidup sebagai kepentingan hukum belum memperoleh perlindungan secara eksplisit. Kesehatan umum dan nyawa manusia jauh lebih sempit apabila dibandingkan dengan pengertian lingkungan hidup yang luas.

Berdasarkan bunyi Pasal 46 UUPH bahwa Pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada :

- a. Badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut;
- b. Mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau;
- c. Kedua-duanya (a dan b).

Ketentuan pasal 46 UUPH tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana badan hukum atau korporasi

Dalam membicarakan tentang masalah pertanggungjawaban pidana korporasi maka yang perlu diperhatikan adalah pada sistem perumusan yang menyatakan bahwa badan hukum itu sendiri dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa motivasi dari sistem pertanggungjawaban badan hukum/korporasi ini adalah didasarkan pada perkembangan terutama dalam bidang ekonomi dan lingkungan hidup. Hal ini

---

<sup>8)</sup> Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : BP UNDIP, h. 204

dikarenakan tindak pidana ekonomi dan tindak pidana lingkungan hidup dapat mengakibatkan kerugian negara atau masyarakat lebih besar jika dibandingkan dengan pidana denda yang dijatuhkan kepada pengurus badan hukum yang melakukan tindak pidana.

Di samping itu dengan dipidanya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa badan hukum atau korporasi tidak lagi melakukan tindak pidana atau dengan kata lain "*deterent effect*"nya tidak dapat diharapkan dengan baik apabila hanya pengurus saja yang dipidana.

Sebagaimana diungkapkan **Roeslan Saleh**<sup>9)</sup> bahwa ternyata dipidanya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan "*repressi*" terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi, karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, korporasi dan pengurus atau pengurus saja.

Sedangkan **Peter Gillies**<sup>10)</sup> mengungkapkan bahwa perusahaan/korporasi dapat melakukan banyak delik misalnya : *conspiracy, criminal libel, contempt of court*, penggelapan pajak, pasar gelap, membantu delik yang menimbulkan kematian akibat berkendara yang berbahaya (*dangerous driving*). Selain itu ada beberapa batasan sehingga korporasi dikatakan tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu :

---

<sup>9)</sup> Dalam M. Hamdan, 2000, *Tindak Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung : Mandar Maju, h. 82

<sup>10)</sup> Dalam Barda Nawawi Arief, 2001, *Perbandingan Hukum Pidana (Sari Kuliah II)*, Semarang : Program Magister Ilmu Hukum, h. 134 - 135

1. apabila "*a responsible officer*" dari perusahaan, tidak dapat dipandang sebagai melakukan delik dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang melakukan perbuatan untuk perusahaan.
2. apabila sifat/hakikat perbuatan tidak dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk mampu dilakukan perusahaan/korporasi misal : perkosaan (*rape*), penyerangan seksual (*sexual assault*) dan bigami.

Sebagaimana dicontohkan bahwa di Inggris, perusahaan pernah dihukum sebagai pembantu (*accessory*) untuk delik yang menyebabkan kematian karena *dangerous driving* (Robert Millar (*contractors*) Ltd., 1970). Dengan melihat faktanya bahwa perusahaan dapat dihukum sebagai "*a principal*" yaitu perusahaan memiliki lori/truk dan mempekerjakan sopir. Lori/truk itu keluar dari jalan raya, ketika salah satu bannya dalam kondisi tidak sempurna/rusak dan berbahaya. Ban itu kemudian pecah dan terjadilah tabrakan fatal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dasar pertanggungjawaban pidana korporasi adalah doktrin *Direct Corporate Liability* atau *The Identification Doctrine*. Menurut doktrin/teori ini, perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu perusahaan bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam perusahaan sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup

kewenangannya atau dalam urusan transaksi perusahaan. Dengan kata lain perbuatan/delik dan kesalahan/sikap batin pejabat senior dipandang sebagai perbuatan dan sikap batin perusahaan. Unsur-unsur delik dapat dikumpulkan dari perbuatan dan sikap batin beberapa pejabat senior.<sup>11)</sup>

Doktrin pertanggungjawaban langsung (*direct liability doctrine*) juga menunjuk pada *alter ego / identification doctrine* atau *the primary corporate liability doctrine*. Hal ini dapat dilihat pada beberapa putusan Inggris pada tahun 1944 sebagai berikut<sup>12)</sup> :

1. Kasus *D.P.P. V. Kent and Sussex Contractors Ltd.* (1944)

Pengadilan mempertanggungjawabkan korporasi atau delik tentang peraturan pendistribusian bensin yang mensyaratkan bukti adanya unsur “sengaja menipu” (*intent to deceive*). Kesengajaan itu ada pada “*transpor manager*”. Hakim **Viscount Caldecote** mempertimbangkan bahwa sikap batin jahat dari manajer itu dapat diatribusikan kepada perusahaan dan diperlakukan sebagai sikap batin jahat dari perusahaan dengan menyatakan : “walaupun para direktur dan pimpinan umum adalah para agen, mereka lebih dari itu. Suatu perusahaan mampu berbuat, berbicara, maupun berpikir seperti yang diperbuat, dibicarakan atau dipikirkan oleh para manajernya”.

---

<sup>11)</sup> *Ibid.* 136 - 139

<sup>12)</sup> *Ibid.* h. 140 - 141

2. Pengadilan banding dalam kasus *I.C.R. Haulage Ltd.* (1944) memperkuat penghukuman kepada peming/pemusahaan, direktur manajer dan orang-orang lain atas perbuatan melakukan "konspirasi untuk penipuan" (*conspiracy to defraud*). Pengadilan mengemukakan, bahwa bukti-bukti membenarkan penemuan bahwa perbuatan-perbuatan dari direktur, manajer merupakan perbuatan dari perusahaan dan penipuan dari orang itu merupakan penipuan dari perusahaan. Dalam hal-hal khusus perbuatan pidana dari agen termasuk sikap batinnya, kesengajaan, pengetahuan atau keyakinannya merupakan perbuatan dari perusahaan, harus bergantung (antara lain) pada kedudukan dari pejabat atau agen itu.
3. Putusan pengadilan dalam kasus *Moore v.l. Brester Ltd.* (1944) mengemukakan hal serupa yaitu : kasusnya tentang penyembunyian (*submission*) pengembalian pajak perdagangan (*purchase tax*) yang dilakukan dengan "sengaja menipu" (*intent to deceive*). Sekretaris dan manajer penjualan dari perusahaan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan dengan kesengajaan yang demikian. Hakim **Viscount Caldecote** mengemukakan : "Kedua orang ini merupakan pejabat/staf penting dari perusahaan dan .... Oleh karena itu perbuatan mereka adalah perbuatan perusahaan.

Disamping kasus-kasus di atas, terdapat juga Putusan perkara *H.L. Bolton (Engineering) Co. Ltd. V. T.J. Graham & Sons Ltd.* (1971) dan

Perkara *Tesco Supermarket Ltd. V. Nattras* (1972) menetapkan bahwa pejabat senior dari perusahaan dipandang sebagai perusahaan dan perbuatannya dipandang sebagai perbuatan perusahaan. Doktrin *direct corporate liability* juga diakui oleh pengadilan-pengadilan Australia (a.l. kasus *Universal Telecast-ers (Old) Ltd. V. Guthrie* (1977))

Sedangkan Nico Keijzer<sup>13)</sup> mengemukakan mengenai kondisi-kondisi bagaimana suatu tindak pidana dapat dipandang telah dilakukan oleh korporasi dengan menggunakan contoh sebagai berikut :

1. *American Model Penal Code* (MPC)

- a. *If a legislative purpose to impose liability on corporations plainly appears and the conduct is performed by an agent of the corporation acting in behalf of the corporation within the scope of his office or employment;* or (Apabila maksud pembuat UU untuk mengenakan pertanggungjawaban pada korporasi nampak dengan jelas dan perbuatan itu dilakukan oleh agen korporasi yang melakukan a/n korporasi dalam ruang lingkup jabatan/tugas atau pekerjaannya); atau
- b. *If the offence consists of an omission to discharge a spesific duty of affirmative performance imposed on corporations by law;* or (apabila tindak pidana itu merupakan suatu pengabaian/pelanggaran kewajiban khusus yang dibebankan kepada korporasi oleh UU); atau
- c. *If the commission of the offence was authorized, requested, commanded, performed or recklessly tole rated by the board of directors or by a high managerial agent acting in behalf of the corporation within the scope of his office or employment* (apabila dilakukannya tindak pidana itu dibenarkan/disahkan, diminta, diperintahkan, dilaksanakan atau dibiarkan/ditolerir secara sembrono oleh dewan direksi atau oleh agen pimpinan puncak

---

<sup>13)</sup> Dalam Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, h. 126 - 127



yang bertindak a/n korporasi dalam batas-batas ruang lingkup tugas/pekerjaannya).

2. *Dutch Case Law* (Yurisprudensi Belanda)

- a. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan UU yang secara khusus ditunjukan bagi korporasi.
- b. Apabila korporasi berkewajiban mencegah terjadinya tindak pidana, tetapi gagal berbuat demikian.
- c. Apabila tindak pidana itu berhubungan dengan bidang usaha korporasi yang bersangkutan.

b. Pertanggungjawaban pidana pengurus badan hukum atau korporasi

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum tetapi pengurus yang bertanggungjawab adalah berdasarkan kepada anggapan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dilakukan manusia secara fisik dalam keadaan nyata dan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan itu menyangkut kejiwaan yang hanya dapat dimiliki oleh manusia saja. Dengan demikian tidak ada konstruksi lain yang dapat digunakan selain daripada ukuran pertanggungjawaban pengurus atau wakil korporasi.<sup>14)</sup>

---

<sup>14)</sup> A. Z. Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta Pradnya Paramita, h. 63

Sehubungan dengan pertanggungjawaban pengurus tersebut di atas **Roeslan Saleh**<sup>15)</sup> berpendapat bahwa dalam hal ini pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab, sedangkan yang dipandang dilakukan oleh korporasi (badan hukum) hanyalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan Anggaran Dasarnya.

Mengenai pertanggungjawaban pidana pengawas/pengurus ini, **Nico Keijzer**<sup>16)</sup> melihatnya/meninjaunya dari sudut peranannya di dalam korporasi itu sebagaimana dicontohkan dalam :

1. *American Model Penal Code* (MPC)

Dalam hal kewajiban melakukan sesuatu dibebankan oleh undang-undang kepada korporasi....setiap agen korporasi yang mempunyai tanggungjawab untuk pelanggaran/pengabaian secara sembrono atas kewajiban itu, sama seperti apabila kewajiban itu dibebankan secara langsung kepadanya oleh UU.

2. Yurisprudensi Belanda menetapkan, pengurus dapat dipidana apabila :

- a. ia tahu, bahwa pelanggaran itu sedang terjadi dan
- b. ia dapat dan seharusnya campur tangan, tetapi gagal berbuat demikian.

---

<sup>15)</sup> Dalam M. Hamdan, *Op. Cit.*, h. 80 - 81

<sup>16)</sup> Dalam Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, h. 128 - 130

Selanjutnya mengenai tindakan yang seharusnya diambil oleh pengurus **Nico Keijzer**<sup>17)</sup> mengungkapkan bahwa tidak cukup bahwa ia telah memerintahkan perbuatan/delik itu dihentikan karena ia juga mengontrol bahwa perintahnya telah dipatuhi secara tepat (*it does not suffice that he has ordered the criminal conduct to be stopped, for he must also control that his order is properly complied with*); untuk mempertanggungjawabkan pengurus tidak disyaratkan bahwa korporasi masih tetap ada (*for the criminal liability of the supervisor, it is not a requirement that the corporation still is in existence*); tidak disyaratkan bahwa si pengurus/pengawas itu adalah pegawai dari korporasi itu (*it is not a requirement that the supervising individual is an employee of the corporation*).

Sedangkan **Peter Gillies**<sup>18)</sup> mengungkapkan dengan suatu teori atau doktrin *Vicarious Liability* dengan mengatakan bahwa pengadilan telah mengembangkan sejumlah prinsip-prinsip mengenai "*employment principle*". Menurut doktrin ini, majikan (*employer*) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan-perbuatan para buruh/karyawan yang melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup/pekerjaannya. Sebagaimana dicontohkan di Australia "*the vicar's criminal act*" (perbuatan dalam delik vicarious) dan "*the*

---

<sup>17)</sup> *Ibid.* h. 128 - 129

<sup>18)</sup> *Ibid.*, h. 135 - 136

*vicar's guilty mind*" (kesalahan/sikap batin jahat dalam delik vicarious) dapat dihubungkan dengan majikan atau pembuat (*principal*). Berbeda di Inggris "*a guilty mind*" hanya dapat dihubungkan (dengan majikan) apabila ada delegasi kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut undang-undang.

Bertolak dari "*employment principle*" kaitannya dengan vicarious liability dapat dibuat suatu proposisi sebagai berikut : Suatu perusahaan, dapat bertanggungjawab secara mengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan/agennya.

Mengenai Vicarious Liability **John C. Coffee Jr.**<sup>19)</sup> mengungkapkan kritik terhadap ide pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut yaitu :

1. *Vicarious liability* hanya tepat sebagai prinsip untuk hukum ganti rugi (tort law) karena pembenarannya terletak pada pembagian kerugian pada pihak yang lebih dapat menanggung (atau setidaknya tidaknya lebih berhak mendapat beban itu), tetapi ia berkaitan dengan tujuan-tujuan dalam hukum pidana (*retribution, deterrence, prevention, rehabilitation*).
2. *Vicarious liability* tidak adil karena bebannya jatuh pada yang tidak bersalah daripada yang salah, yaitu hukuman ditanggung oleh para pemegang saham dan orang-orang lain yang mempunyai

---

<sup>19)</sup> *Ibid.*, h. 160 - 161

kepentingan dalam korporasi, daripada dibebankan pada individu yang bersalah;

3. *Vicarious liability* menghasilkan disparitas antara bisnis yang dilakukan dalam bentuk korporasi dengan yang bersifat kepemilikan (*proprietorship*) karena pemilik individual tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana untuk perbuatan-perbuatan bebas dari para pegawainya.
  4. *Vicarious liability* untuk korporasi dapat membuka pintu dimasa yang akan datang untuk *vicarious liability* yang diperluas juga bagi individu.
- c. Pertanggungjawaban korporasi dan pertanggungjawaban pengurus (kedua-duanya)

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan adanya perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik-delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Mengenai hal ini bisa dilihat dalam tindak pidana ekonomi dimana tidak mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima korporasi dengan melakukan perbuatan itu atau kerugian yang ditimbulkannya lebih besar dari denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Oleh karena itu dipidananya pengurus tidak

memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu undang-undang.

Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan "*repressi*" terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Oleh karena itu perlu pula dimungkinkannya memidana korporasi, korporasi dan pengurus atau pengurus saja.<sup>20)</sup>

Sehubungan dengan pertanggungjawaban korporasi dan pertanggungjawaban pengurus, **Loebby Loqman**<sup>21)</sup> mengatakan apabila suatu badan hukum melakukan pencemaran/perusakan lingkungan hidup, maka ada beberapa kemungkinan yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya. Kemungkinan pertama manusianya, kemungkinan kedua korporasinya (badan hukum) dan kemungkinan ketiga kedua-duanya.

Sedangkan hukuman pidananya dapat dijatuhkan secara kumulatif, yaitu hukuman penjara dan hukuman denda. Pidana berupa denda harus dijatuhkan terhadap perusahaan berupa korporasi (badan hukum) dan pidana penjara bagi pengurus yang bertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran tersebut.<sup>22)</sup>

---

<sup>20)</sup> Dalam Muladi dan Dwidja Priyanto, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung : STHB, h. 71

<sup>21)</sup> Loebby Loqman, 1991, *Pertanggungjawaban Pidana bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Makalah, Jakarta. FH Universitas Pancasila, h. 19

<sup>22)</sup> Mardjono Reksodiputro, 1982, *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Yang Mengalami Modernisasi*, Bandung : Binacipta, h. 71

Apabila kita melihat kembali ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 46 UUPH sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, **Barda Nawawi Arief**<sup>23)</sup> dalam buku "Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", beliau mengungkapkan bahwa pasal tersebut merupakan kemajuan dibandingkan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Namun masih menjadi permasalahan apakah pertanggungjawaban badan hukum dalam pasal 46 itu dapat berlaku juga untuk semua Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) yang diatur dalam perundang-undangan lain. Ditambahkan bahwa didalam UUPH tidak terlihat rambu-rambu ketentuan yang menyatakan bahwa Pasal 46 dapat berlaku umum untuk semua TPLH di luar UUPH. Bahkan, dalam ketentuan penutup Pasal 50 ditegaskan bahwa semua perundang-undangan lingkungan hidup yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.

---

<sup>23)</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Op. Cit., h. 107

Apabila melihat hal tersebut diatas maka ketentuan itu tidak sejalan dengan ide UUPLH sebagai Undang-Undang Payung.<sup>24)</sup> Sebagaimana diketahui bahwa materi yang diatur dalam undang-undang tentang lingkungan hidup mencakup hal yang luas maka tidak mungkin dicakup dalam satu undang-undang. Oleh karena itu ditempuh pengaturan secara pokok yang hanya memuat asas-asas dan prinsip-prinsipnya. Dengan demikian UUPLH merupakan ketentuan payung (*umbrella act, umbrella provision, kaderwet* atau *raamwet*) berdasarkan kesadaran bahwa implementasi undang-undang tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan dengan penuh tanggung jawab agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.<sup>25)</sup>

Disamping itu UUPLH akan menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundangan yang memuat ketentuan tentang segi-segi lingkungan hidup yang kini sudah berlaku seperti mengenai pengairan, pertambangan dan energi, kehutanan, perlindungan dan pengawetan alam, industri, permukiman, tata ruang, tata guna tanah dan sebagainya. Dengan demikian semua peraturan tersebut dirangkum dalam satu sistem hukum lingkungan Indonesia.<sup>26)</sup>

---

<sup>24)</sup> *Ibid.*

<sup>25)</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, h. 29

<sup>26)</sup> *Ibid*



Hal senada diungkapkan Koesnadi Hardjosoemantri dalam buku "Hukum Tata Lingkungan" yang menjelaskan bahwa materi bidang lingkungan sangat luas mencakup segi-segi ruang angkasa, puncak gunung sampai ke perut bumi dan dasar laut dan meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber alam nonhayati dan sumber daya buatan. Materi tersebut tidak mungkin diatur secara lengkap dalam satu undang-undang tetapi memerlukan seperangkat peraturan perundang-undangan dengan arah dan ciri yang serupa. Sehubungan dengan hal tersebut maka UUPH berfungsi sebagai payung (*umbrella act*) bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan bagi penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah ada.<sup>27)</sup>

Sebagai masalah nasional, secara yuridis persoalan kejahatan lingkungan dikategorikan sebagai tindak pidana administratif (*regulatory offences*) atau tindak pidana yang mengganggu kesejahteraan masyarakat (*public welfare offenses*).<sup>28)</sup> Kemudian tindak pidana ini semakin populer sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH). Adapun dalam jangka waktu

<sup>27)</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, h. 67

<sup>28)</sup> Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : BP Universitas Diponegoro, h. 191

pemberlakuan undang-undang tersebut sampai saat ini dikatakan oleh **Muladi**<sup>29)</sup> bahwa pengaturan tindak pidana lingkungan hidup yang secara idiil dimaksudkan untuk dapat melakukan rekayasa sosial (*social engineering*), masih memerlukan penyempurnaan ditinjau dari seluruh permasalahan pokok hukum pidana yakni : perumusan tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidan (*criminal responsibility*) dan sanksi (*sanction*) baik yang merupakan pidana (*punishment*) maupun tindakan tata tertib.

Sehubungan dengan pemberlakuan undang-undang tentang lingkungan hidup di atas sampai diundangkannya Undang-Undang baru tentang lingkungan hidup yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (UUPLH) maka sebagai data pendukung, penulis mengadakan penelitian lapangan di Propinsi Kalimantan Selatan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden tentang penjatuhan/pemberian sanksi pidana kepada badan hukum/korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH). Adapun data yang diperoleh dapat dilihat dalam tabel berikut :

---

<sup>29)</sup> *Ibid.*, h.

Tabel 1

Pendapat responden tentang pemberian  
Sanksi pidana terhadap korporasi dalam TPLH  
(N = 53)

Profesi	Jawaban				Jumlah 、	
	setuju		tidak setuju			
	n	%	n	%	n	%
Polisi	8	15.09	-	-	8	15.09
Jaksa	9	16.98	-	-	9	16.98
Hakim	8	15.09	2	3.77	10	18.87
Pengacara/LBH	11	20.75	4	7.55	15	28.30
Pengusaha	10	18.87	1	1.89	11	20.75
Jumlah	46	86.78	7	13.21	53	100

Berdasarkan data empiris tersebut di atas, dengan mengambil responden sebanyak 53 orang yang terdiri dari aparat penegak hukum sebanyak 8 orang anggota kepolisian daerah Kalsel, 9 orang jaksa di wilayah Kejaksaan Tinggi Kalsel, Pengacara sebanyak 15 orang di wilayah hukum Banjarmasin dan 11 orang pengusaha (perusahaan di Banjarmasin), mereka pada umumnya setuju perusahaan yang melakukan TPLH diberi sanksi pidana (sebanyak 86.78 %). Sedangkan yang tidak setuju sebanyak 13.21 %. Adapun alasan penempatan korporasi sebagai subjek TPLH dikarenakan adanya akibat yang serius dari TPLH bagi masyarakat.

Sebagaimana hasil penelitian di atas, terlihat sebagian besar responden setuju dengan pemberian sanksi pidana terhadap korporasi dalam TPLH. Akan tetapi dalam prakteknya tidak dijumpai adanya pemberian/penjatuhan sanksi pidana kepada korporasi dalam kasus-kasus TPLH. Mengenai hal ini bisa dilihat dalam tabel 2 berikut ini.

Tabel 2

Pendapat responden tentang ada atau tidaknya  
pemberian/penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi dalam  
TPLH  
(N = 53)

Profesi	Jawaban				Jumlah	
	Ya		tidak			
	n	%	n	%	n	%
Polisi	-	-	8	15.09	8	15.09
Jaksa	-	-	9	16.98	9	16.98
Hakim	-	-	10	18.87	10	18.87
Pengacara/LBH	-	-	15	28.30	15	28.30
Pengusaha	-	-	11	20.75	11	20.75
Jumlah	-	-	53	100.00	53	100.00

Berdasarkan tabel 2 di atas maka seluruh responden mengatakan tidak ada atau belum ada sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi dalam kasus-kasus TPLH. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi dalam TPLH di wilayah Pengadilan Tinggi Kalsel.

Sehubungan dengan pendapat dari para sarjana yang telah disampaikan dimuka dan pendapat responden tentang pemberian sanksi pidana terhadap korporasi dalam TPLH (tabel 1 dan tabel 2) di atas menurut hemat penulis berdasarkan perkembangan teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana korporasi maka korporasi dapat dijadikan sebagai subjek hukum pidana. Dengan diterimanya atau diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana maka seyogyanya diatur secara lengkap dan terperinci yang berhubungan dengan sistem pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) korporasi dalam setiap produk perundang-undangan yang dihasilkan lembaga legislatif.

## 2. **Kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana**

Mengenai kapankah badan hukum itu dapat dikatakan melakukan tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut :

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa badan hukum dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila ada

orang/orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja dan dalam lingkungan badan hukum itu melakukan sesuatu yang menurut undang-undang tersebut merupakan tindak pidana.

Sebagaimana dicontohkan **Barda Nawawi Arief**<sup>30)</sup> yaitu dalam Pasal 15 ayat (2) UU Tindak Pidana Ekonomi dikatakan memang ada perumusan yang “seolah-olah” menjelaskan kapan suatu badan hukum itu dikatakan telah melakukan tindak pidana dengan perumusan yang berbunyi sebagai berikut :

Suatu tindak pidana....dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum...jika tindakan itu dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum,.....

Dengan adanya kata “dilakukan juga” disini jelas bahwa perumusan tersebut hanya merupakan fiksi yang memperluas bentuk tindak pidana yang sebenarnya tidak dilakukan oleh badan hukum akan tetapi dianggap telah dilakukan juga oleh badan hukum. Oleh karena itu perumusan tersebut tidak menjelaskan pengertian kapan badan hukum itu dikatakan melakukan (sebagai pembuat) tindak pidana. Selanjutnya **Barda Nawawi Arief** mengungkapkan bahwa apabila perumusan itu dimaksudkan untuk menjelaskan hal tersebut maka dapat digunakan rumusan sebagai berikut :

Suatu tindak pidana....dilakukan oleh badan hukum atau atas nama badan hukum, apabila.....(misalnya : dilakukan oleh pengurus, salah seorang

---

<sup>30)</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Op. Cit., h. 134 - 135

anggota pengurus atau atas nama pengurus/anggota pengurus atau menurut ketentuan yang berlaku pada badan hukum yang bersangkutan).<sup>31)</sup>

Selanjutnya apabila melihat Penjelasan Pasal 15 UU TPE yang antara lain berbunyi : Ayat 2 menentukan dalam hal-hal mana suatu tindak pidana ekonomi dianggap dilakukan oleh badan hukum...dan seterusnya. Dengan adanya rumusan Pasal 15 ayat (2) di atas juga belum memberikan ketegasan mengenai batasan atau ukuran yang dipakai untuk menentukan suatu tindak pidana ekonomi itu dilakukan oleh suatu badan hukum atau korporasi. Hanya dikatakan batasan atau ukurannya disebutkan yaitu :

- a. berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain; dan
- b. bertindak dalam lingkungan badan hukum.<sup>32)</sup>

Dalam hubungan dengan batasan adanya “hubungan kerja”,

**Soeprapto** menyatakan :

“Ini adalah suatu fiksi ialah dalam hal ini suatu badan dianggap melakukan hal yang tidak dilakukannya, tetapi dilakukan oleh orang yang ada dalam hubungan kerja pada badan itu.”<sup>33)</sup>

Selanjutnya **Soeprapto** mengatakan tentang adanya “hubungan lain” sebagai berikut :

“Keganjilan lebih menonjol, bilamana dipergunakan dasar “hubungan lain” yang disebut dalam Pasal 15 ayat (2) untuk mempertanggungjawabkan suatu badan hukum atas perbuatan orang lain. Hubungan lain itu misalnya terdapat dalam perseroan

<sup>31)</sup> *Ibid.*, h. 134 - 135

<sup>32)</sup> Dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung : STHB, h. 74

<sup>33)</sup> *Ibid.* h. 75

terbatas dan seseorang yang mewakilinya dalam penjualan barang-barangnya, yang hanya mendapat komisi (*commissie agent*), jadi tidak dalam hubungan kerja dengan badan tersebut.<sup>34)</sup>

Sehubungan dengan permasalahan kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana lingkungan hidup, dijelaskan dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 bahwa badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain dapat melakukan tindak pidana hanya tidak dinyatakan secara rinci kapan korporasi tersebut dikatakan melakukan suatu tindak pidana.

### 3. Dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan

Setelah korporasi/badan hukum dinyatakan telah melakukan tindak pidana, maka permasalahan selanjutnya adalah bagaimanakah menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban badan hukum tersebut. Hal ini dikarenakan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi/badan hukum harus terlebih dahulu menentukan kesalahan.

Mengenai bagaimana cara menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban badan hukum ini masih menimbulkan perbedaan pendapat sebagaimana dicontohkan oleh **Barda Nawawi Arief**<sup>35)</sup> dengan mengambil suatu kasus di bidang tindak pidana ekonomi yang menimbulkan perbedaan pendapat antara **Soeprapto** dan **Roeslan Saleh**. Adapun kasusnya adalah sebagai berikut :

<sup>34)</sup> *Ibid.*

<sup>35)</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Op. Cit., h. 138



“Seorang manager dari suatu perusahaan menjual suatu jenis barang dengan harga yang lebih tinggi daripada harga tertinggi yang diperkenankan oleh pemerintah. Menaikkan harga terlarang itu tidak sepengetahuan Direktur PT dan jika ia mengetahui tentu akan menggagalkannya.”

Menanggapi kasus di atas yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana badan hukum, **Soeprapto** pada intinya berpendapat bahwa tidaklah mungkin badan hukum dipertanggungjawabkan juga atas perbuatan orang lain (manager) yang melakukan dengan sengaja. Hal itu tidak mungkin karena pada badan hukum tadi tidak ada unsur kesengajaan. Jadi menurut **Soeprapto** walaupun sebenarnya tindak pidana ekonomi itu (dengan sengaja menaikkan harga terlarang) dilakukan oleh manager yang ada hubungan kerja dengan PT sebagai badan hukum, namun tetap badan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila ternyata tidak ada unsur kesengajaan sebagai salah satu unsur kesalahan. Tidak adanya unsur kesengajaan pada PT (badan hukum) itu dikonstruksikan pada tidak adanya kesengajaan pada diri Direktur PT.

Kemudian pendapat demikian dilanjutkan pula dalam hal pelaku adalah orang yang tidak ada hubungan kerja dengan badan hukum tersebut tetap berdasar hubungan lain misalnya orang yang mewakili PT dalam penjualan barang-barangnya yang hanya mendapat komisi. Dalam hal ini **Soeprapto** berpendapat apabila badan tersebut harus pula bertanggungjawab atas perbuatan seorang yang melakukan perwakilan untuknya seperti tersebut di atas maka dapat dimengerti bahwa terlalu jauh diperluasnya

pertanggung jawaban. Sehubungan dengan hal tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa menurut Beliau untuk dapat dipertanggungjawabkannya suatu badan hukum, prinsip atau asas kesalahan tetap tidak dapat ditinggalkan.<sup>36)</sup>

Sedangkan asas kesalahan kaitannya dengan masalah pertanggungjawaban pidana korporasi ini maka menurut **Van Bemmelen**<sup>37)</sup> persoalan tersebut akan timbul terutama pada delik-delik dengan unsur kealpaan (culpa) karena kealpaan ini (juga kesengajaan) dapat timbul dari perbuatan kerjasama (disadari maupun tidak) dari orang-orang tersebut.

Mengenai asas kesalahan **Friedmann**<sup>38)</sup> mengungkapkan bahwa dalam hal *public welfare offences*, untuk dapat memidana korporasi jangan terlalu ditekankan pada segi unsur kesalahan. Sudah cukup apabila korporasi tersebut telah memenuhi perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Hal ini berarti bahwa untuk Indonesia pun dimungkinkan apabila korporasi dituduh berbuat suatu tindak pidana yang termasuk kategori *public welfare offences*, harus selalu diterapkan ajaran *fait material* dimana tidak diperlukan adanya unsur kesalahan (*ajaran strict liability*).

Selanjutnya apabila melihat teori atau doktrin *Direct Corporate Liability* atau *The Identification Doctrine* maka kesalahan terdapat pada pejabat senior yaitu orang-orang tertentu yang berhubungan erat dengan

---

<sup>36)</sup> *Ibid.*, h. 138 - 139

<sup>37)</sup> Dalam Hermien Hadiati Koeswadji, *Op. Cit.*, h. 78

<sup>38)</sup> *Ibid.*

korporasi dan dengan pengelolaan korporasi. Dengan kata lain bahwa perbuatan/delik dan kesalahan/sikap batin pejabat senior dipandang sebagai perbuatan dan sikap batin perusahaan. Sedangkan unsur-unsur delik dapat dikumpulkan dari perbuatan dan sikap batin beberapa pejabat senior.

Menurut **Peter Gillies**<sup>39)</sup>, untuk mengidentifikasi apakah pejabat perusahaan mampu mewakili perusahaan terdapat kiasan/metafora dari hakim Denning L.J. dalam perkara *H.L. Bolton (Engineering) Co. Ltd. v. T.J. Graham & Sons Ltd.* (1975) sebagai berikut :

“Suatu perusahaan dalam banyak hal disamakan dengan orang. Ia mempunyai pusat otak dan syaraf yang mengontrol apa yang diperbuat. Ia juga mempunyai tangan-tangan yang memegang alat-alat dan berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk pusat syaraf itu. Beberapa orang di dalam perusahaan itu ada yang semata-mata pegawai dan agen-agen yang tidak lebih daripada tangan-tangan untuk melakukan pekerjaan dan tidak dapat dikatakan mewakili sikap batin dan keinginan perusahaan. Yang lain adalah para direktur dan manajer yang mewakili / melambangkan sikap batin dan kehendak perusahaan dan mengontrol apa yang dilakukan oleh perusahaan. Keadaan jiwa/sikap batin para manajer ini merupakan keadaan jiwa/sikap batin perusahaan dan diperlakukan demikian menurut UU.

Sedangkan konsep umum sebagaimana diungkapkan di atas terrefleksi dalam banyak pernyataan di berbagai kasus sebagai berikut<sup>40)</sup> :

a. Putusan *House of Lords* dalam kasus *Tesco Supermarket Ltd.*

- Hakim Reid memandang bahwa untuk tujuan hukum, para pejabat senior biasanya terdiri dari dewan direktur, direktur pelaksana dan

<sup>39)</sup> Dalam Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Op. Cit. h. 142.

<sup>40)</sup> *Ibid.* h. 143 – 144.

pejabat-pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan. Konsep pejabat senior tidak mencakup “semua perusahaan yang bekerja atau melaksanakan petunjuk pejabat tinggi perusahaan”.

- **Lord Morris** menunjuk pada orang yang tanggungjawabnya mewakili/melambangkan pelaksana dari “*the directing mind and will of the company*”.

- **Viscount Dilhorne** menggunakan kata-kata yang sama, antara lain :

“..... *In my view, a person who is in actual control of the operations of a company or of part of them and who is not responsible to another person in the company for the manner in which he discharges his duties in the sense of being under his orders, is to be viewed as being a senior officer*”.

- **Lord Diplock** berkomentar sebagai berikut :  
“orang-orang mana yang secara hukum dipandang sebagai perusahaan, diperoleh dengan mengidentifikasi mereka-mereka yang berdasarkan memorandum dan ketentuan-ketentuan yayasan atau hasil keputusan para direktur atau putusan rapat umum perusahaan, telah dipercaya melaksanakan kekuasaan perusahaan”.

b. Putusan dalam kasus *Universal Telecasters (Old) Ltd. v. Guthrie (1977)*.

Tiga hakim mendukung pengujian dalam kasus Tesco di atas, tetapi berbeda dalam penerapannya.

- Hakim **Bowen C.J.** dan **Franki J.** berpendapat bahwa “*the sales manager*” dari perusahaan yang mengoperasikan stasiun televisi, bukanlah “*senior officer*”.

- Hakim Nimmo J berpendapat, ia dapat diidentifikasi sebagai perusahaan yaitu sebagai "*senior officer*". Ia berpendapat bahwa walaupun orang itu tidak memiliki kekuasaan manajemen yang umum, tetapi ia mempunyai kebijaksanaan manajerial (*manajerial discretion*) yang relevan dengan operasi perusahaan yang menyebabkan timbulnya delik. Dengan kata lain, dalam pandangannya pejabat perusahaan dapat menjadi "*senior officer*" dalam bidang yang relevan.

Sehubungan dengan perumusan tindak pidana lingkungan dalam perundang-undangan lingkungan hidup sebagaimana diungkapkan Muladi<sup>41)</sup> bahwa dalam merumuskan tindak pidana lingkungan hendaknya selalu diingat bahwa kerugian dan kerusakan lingkungan hidup tidak hanya yang bersifat nyata (*actual harm*) tetapi juga yang bersifat ancaman kerusakan potensial baik terhadap lingkungan maupun kesehatan umum. Hal ini disebabkan karena kerusakan tersebut seringkali tidak seketika timbul dan tidak dengan mudah untuk dikuantifikasi. Sehubungan dengan ini untuk *generic crime* yang relatif berat sebaiknya dirumuskan sebagai tindak pidana materiil, dalam hal mana akibat merupakan unsur hakiki yang harus dibuktikan. Sedangkan untuk tindak pidana yang bersifat khusus (*specific crime*) yang melekat pada hukum administratif dan relatif lebih ringan maka perumusan yang bersifat formil tanpa menunggu pembuktian akibat yang

---

<sup>41)</sup> Muladi, *Op. Cit.*, h. 203

terjadi dapat dilakukan. Selanjutnya sikap batin yang menjadi elemen tindak pidana tersebut dapat mencakup perbuatan sengaja (*dolus, knowingly*), sengaja dengan kemungkinan (*dolus eventualis, recklessness*) dan kealpaan (*culpa, negligence*).

Disamping hal yang telah disampaikan di atas, Muladi<sup>42)</sup> juga berpendapat bahwa dalam merumuskan tindak pidana dalam perundang-undangan lingkungan hendaknya juga dipertimbangkan adanya dua macam elemen yaitu elemen material (*material element*) yang mencakup adanya perbuatan atau tidak berbuat sesuatu (*omission*) yang menyebabkan terjadinya tindak pidana atau perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar atau bertentangan dengan standar lingkungan yang ada. Sedangkan elemen mental (*mental element*) mencakup pengertian bahwa berbuat atau tidak berbuat tersebut dilakukan dengan sengaja, *recklessness (dolus eventualis* atau *culpa gravis*) atau kealpaan (*negligence*). Dikatakan oleh beliau bahwa pembagian seperti itu biasa dikenal dalam Sistem hukum Anglo Saxon dimana hukum di Indonesia lebih banyak dipengaruhi Sistem Hukum Kontinental yang membedakan kateogri-kategori kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*culpa*).

---

<sup>42)</sup> *Ibid.*, h. 203 - 204

#### 4. Jenis-Jenis Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan untuk Korporasi

Penggunaan sanksi pidana yang selama ini ada, pada umumnya ditujukan kepada kepentingan yang berupa nyawa, kemerdekaan/ kebebasan atau harta benda manusia. Sedangkan sumber utama dari pencemaran/perusakan lingkungan adalah manusia itu sendiri dan sebenarnya hakikat dari pencemaran/perusakan lingkungan adalah adanya “ketidaksamaan” atau “ketidakseimbangan” dalam lingkungan hidup manusia itu sendiri. Sedangkan faktor menonjol yang dapat menggoncangkan atau mengganggu keseimbangan itu adalah perkembangan teknologi dan ledakan penduduk.<sup>43)</sup>

Terhadap faktor yang menonjol sebagaimana telah dikemukakan di atas, jelas sanksi pidana tidak dapat berbuat banyak. Oleh karena itu yang penting adalah memilih dan menetapkan pidana apa yang paling tepat. Sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Bentham “*punishment ought not to be inflicted if it is groundless, needless, unprofitable or inefficient.*”<sup>44)</sup>

Adapun tujuan dari pemidanaan dalam tindak pidana lingkungan hidup dikatakan oleh **Muladi**<sup>45)</sup> sebagai berikut :

---

<sup>43)</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, h. 131 - 132

<sup>44)</sup> *Ibid.*, h. 132

<sup>45)</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, *Op. Cit.*, h. 197

- Pertama : untuk mendidik masyarakat sehubungan dengan kesalahan moral yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang.
- Kedua : mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan tersebut, untuk memenuhi tujuan seperti di atas maka perlu disediakan pelbagai alternatif yang dapat dipilih oleh hakim dalam menentukan jenis-jenis pidana yang pantas diterapkan kepada pelaku dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan perbuatannya, pelakunya, kesan masyarakat terhadap kejahatan, berat ringannya korban/kerugian dan proyeksi efektivitas pemidanaan.<sup>46)</sup>

Mengenai jenis sanksi yang sebaiknya diterapkan ini, perlu dipikirkan lebih lanjut. Hal ini dikarenakan apabila sanksi tindakan yang berupa penghentian kegiatan perusahaan dan yang sejenisnya dapat berakibat pada para karyawan perusahaan itu sendiri dari pada pengusahannya. Apabila sanksi pidana yang akan digunakan maka pidana denda harus lebih diutamakan.<sup>47)</sup>

Sedangkan jenis sanksi untuk korporasi menurut *International Meeting Of Meeting Of Experts On The Use Of Criminal Sanction In The*

---

<sup>46)</sup> *Ibid.*

<sup>47)</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, h. 133



*Protection Of Environment, Internationally, Domestically And Regionally* di Portland, Oregon, USA 19 – 23 Maret 1994<sup>48)</sup> bahwa semua sanksi kecuali pidana penjara dapat dikenakan kepada badan hukum. Adapun jenis-jenis sanksi untuk pelaku TPLH dapat berupa :

1. penjara (*imprisonment*)
2. sanksi bernilai uang (*monetary sanction*)
  - a. mengganti keuntungan ekonomis (*recoupe any economic benefit*) yang diperoleh terpidana sebagai hasil dari kejahatannya;
  - b. mengganti (*recover*), semua atau sebagian biaya pengusutan/penyidikan dan melakukan perbaikan (*reparation*) setiap kerugian yang disebabkan oleh terpidana.
3. pidana tambahan berupa :
  - a. larangan melakukan perbuatan/aktivitas yang dapat menyebabkan berlanjutnya atau terulangnya kejahatan itu;
  - b. perintah untuk mengakhiri atau tidak melanjutkan kegiatan (untuk sementara atau selamanya), pencabutan ijin kegiatan, pembubaran usaha bisnis;
  - c. perampasan kekayaan (*property/assets*) dan hasil kejahatan dengan memberi perlindungan hak-hak pihak ketiga yang bonafid (jujur/dapat dipercaya/beritikad baik);

---

<sup>48)</sup> Dalam Barda Nawawi Arief, *Op Cit.*, h. 6 - 8

- d. mengeluarkan atau mendiskualifikasi terpidana dari kontrak-kontrak pemerintah, keuntungan fiskal atau subsidi-subsidi;
- e. memerintahkan pemecatan manajer dan mendiskualifikasi/ membatalkan petugas dari jabatannya;
- f. memerintahkan terpidana melakukan perbuatan untuk memperbaiki atau menghindari kerugian terhadap lingkungan;
- g. mengharuskan terpidana mematuhi syarat-syarat/ kondisi yang ditetapkan pengadilan dan untuk mencegah terpidana mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan kejahatan lingkungan lainnya;
- h. memerintahkan publikasi fakta-fakta yang berhubungan dengan putusan pengadilan;
- i. memerintahkan terpidana untuk memberitahu orang-orang yang dirugikan oleh perbuatannya;
- j. memerintahkan terpidana (apabila merupakan organisasi) untuk mengungkapkan/memberitahukan kepada publik di semua negara tempat beroperasinya organisasi yang dikenakan kepadanya kepada cabang-cabangnya, kepada para direktur, petugas, manajer atau karyawannya.
- k. memerintahkan terpidana untuk melakukan pelayanan/kerja sosial (*community service*).

Selanjutnya **Peter Gillies**<sup>49)</sup> dalam "*Criminal Law*"

mengungkapkan bahwa perusahaan/korporasi dapat melakukan banyak delik dengan batasan-batasan tertentu. Salah satu pertimbangan yang relevan adalah masalah pidana. Dikatakan secara normal, pidana yang dapat dikenakan kepada perusahaan adalah pidana denda. Oleh karena itu apabila suatu delik hanya diancam pidana penjara tidaklah mungkin dikenakan kepada perusahaan.

Sebagai contoh di Australia, perusahaan akan dinyatakan tidak mampu melakukan pembunuhan (*murder*) karena delik tersebut hanya diancam dengan pidana penjara.

Mengenai pengenaan sanksi pidana denda ini **John C. Coffee, Jr.**<sup>50)</sup> mengungkapkan beberapa kritik mengenai pertanggungjawaban korporasi telah meragukan apakah korporasi itu sendiri dapat dicegah (dengan pidana). Namun suatu evaluasi memberikan kesimpulan lain bahwa korporasi cenderung menerima sangat sedikit denda dibandingkan dengan ukuran/besarnya korporasi, penghasilannya ataupun keuntungan yang diharapkan diperoleh dari delik yang dilakukan. Oleh karena itu adalah sulit untuk menegaskan bahwa korporasi tidaklah perlu dipidana dan bahwa mereka tidak perlu dicegah.

---

<sup>49)</sup> Dalam Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana, Op. Cit.*, h. 134

<sup>50)</sup> *Ibid.*, 162

Sehubungan dengan hal tersebut di atas terdapat suatu masalah dimana pidana bagi korporasi cenderung dikenakan pada orang/pihak yang tidak bersalah, tidak hanya pada pemegang saham, tetapi juga pada pegawai, kreditor, masyarakat sekitar dan juga bagi konsumen yang mungkin mengganti kerugian korporasi apabila denda dilihat sebagai biaya bisnis. Masalah ini menyarankan keinginan untuk meminimalkan ppidanaan bagi korporasi. Sejumlah usulan misalnya penggunaan denda yang wajar (*an equaty fine*) yang dipungut/ditarik dalam saham umum akan mencegah kebangkrutan korporasi dan meniadakan kerugian bagi bukan pemegang saham, sementara juga menekan perubahan pengawasan korporasi agar mengaktifkan manajemen. Hal yang sama, pidana berupa pengawasan korporasi (*corporate probation*) telah direkomendasikan ialah penggunaan sanksi publisitas (*a publicity sanction*) dan sanksi berupa pelayanan masyarakat (*community service*). Selanjutnya usul-usul tersebut menyarankan bahwa masalah pertanggungjawaban korporasi dapat dan seharusnya dipecah/dipisahkan dari bentuk ppidanaan korporasi yang optimal. Sebaliknya terhadap terdakwa individual.<sup>51)</sup>

Apabila kita melihat kembali kepada hukum positif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 maka jenis pidana pokok yang diancamkan dalam perumusan delik (penjara dan denda), hanya pidana denda yang paling sesuai diterapkan untuk korporasi. Disamping pidana denda,

---

<sup>51)</sup> *Ibid.*, h. 162 - 163

beberapa sanksi tindakan tata tertib yang pada hakikatnya merupakan jenis pidana tambahan (dalam KUHP) sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 UUPLH dapat dijadikan pidana pokok untuk korporasi atau setidaknya sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan secara mandiri. Apabila pidana penjara (perampasan kemerdekaan) merupakan pidana pokok untuk orang maka pidana pokok untuk korporasi yang dapat diidentikkan dengan pidana perampasan kemerdekaan adalah sanksi berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan.

Selanjutnya mengenai pidana denda untuk korporasi dalam UUPLH hanya menentukan bahwa apabila dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga. Dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh korporasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief<sup>52)</sup> hal ini dapat menimbulkan masalah karena ketentuan pelaksanaan pidana denda dalam Pasal 30 KUHP (yaitu apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 bulan) tidak dapat diterapkan korporasi.

---

<sup>52)</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Op. Cit., h. 157

Sehubungan dengan jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan kepada korporasi sebagaimana diuraikan diatas, penulis memperoleh data empiris sebagai berikut :

Tabel 3

Pendapat responden tentang sanksi pidana  
yang sebaiknya diterapkan korporasi dalam TPLH  
(N = 53)

Jawaban responden	Penjara		Denda		Keduanya		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Polisi	1	1.89	2	3.77	5	9.43	8	15.09
Jaksa	-	-	1	1.89	8	15.09	9	16.98
Hakim	-	-	2	3.77	8	15.09	10	18.87
Pengacara	3	5.66	5	9.43	7	13.21	15	28.30
Pengusaha	-	-	11	20.75	-	-	11	10.75

Apabila melihat pendapat responden tentang sanksi pidana yang sebaiknya diterapkan terhadap korporasi dalam TPLH terlihat sebanyak 52.82 % menyatakan sanksi pidana penjara dan denda kedua-duanya dapat dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan TPLH. Sedangkan responden yang berasal dari pengusaha berpendapat sanksi yang tepat dijatuhkan adalah sanksi pidana denda (20.75). Pendapat ini dapat dipahami karena aparat penegak hukum sesuai tugasnya menghendaki sanksi pidana dalam UUPLH dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan dari pihak pengusaha tidak menghendaki terlaksananya sanksi pidana tersebut dapat menyulitkan mereka.

Selanjutnya berdasarkan pendapat dari para sarjana (doktrin), pendapat para responden (lihat table 3) dan perkembangan dunia Internasional mengenai jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan untuk korporasi menurut hemat penulis adalah sanksi pidana penjara dikenakan kepada pengurus korporasi (orang) dan sanksi pidana denda dikenakan kepada korporasi disamping sanksi tindakan tata tertib. Selain itu seyogyanya ada ketentuan khusus tentang pelaksanaan apabila korporasi tidak dapat menjalankan kewajiban membayar pidana denda.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bagian sebelumnya, penulis telah menguraikan berbagai hal tentang kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan lingkungan hidup saat ini adalah :
  - a. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku TPLH (korporasi) dapat dikenakan kepada badan hukum (perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain), mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau bertindak sebagai pemimpin atau kedua-duanya. Dalam perundang-undangan sektoral tidak ada ketentuan secara jelas mengenai hal tersebut.
  - b. Korporasi dikatakan melakukan TPLH apabila ada orang/orang-orang berdasarkan hubungan kerja dan dalam lingkungan badan hukum itu melakukan tindak pidana. Ketentuan seperti ini tidak terdapat di dalam perundang-undangan sektoral.



- c. Berbagai rumusan TPLH dalam perundang-undangan lingkungan hidup sebagian besar mencantumkan unsur sengaja atau kealpaan/kelalaian. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana korporasi pada prinsipnya menganut *liability based on fault*.
  - d. Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan untuk pelaku TPLH adalah sanksi pidana pokok berupa penjara atau denda dan sanksi tindakan tata tertib. Jenis sanksi dalam perundang-undangan sektoral adalah sanksi pidana yaitu berupa pidana pokok (penjara, kurungan dan denda). Dalam perundang-undangan sektoral ada yang mencantumkan pidana tambahan.
2. Kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan lingkungan hidup untuk masa yang akan datang meliputi :
- a. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku TPLH (korporasi) dirumuskan juga dalam perundang-undangan lingkungan sektoral.
  - b. Ketentuan tentang kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana lingkungan hidup diatur secara jelas dan rinci .
  - c. Pertanggungjawaban pidana korporasi bukan lagi sebagai fiksi tetapi secara teoritis dapat dibenarkan. Oleh karena itu asas tersebut dapat dipakai sebagai landasan perumusan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kebijakan perundang-undangan lingkungan hidup yang akan datang.

- d. Perumusan ketentuan pelaksanaan dalam hal korporasi tidak memenuhi kewajiban membayar pidana denda diformulasikan dalam perundang-undangan lingkungan hidup di masa yang akan datang.

## **B. Saran**

Kebijakan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan lingkungan hidup seyogyanya ditindaklanjuti dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat operasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno, 1984, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Jakarta : Erlangga.
- Ali, Chidir, 1999, *Badan Hukum*, Bandung : Alumni.
- Amsyari, Fuad, 1997, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Jakarta ; Ghalia Indonesia.
- Arief, Barda Nawawi, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , *International Meeting of Experts on The Use of Criminal Sanction in The Protection of Environment, Internationally, Domestically and Regionally*, Portland Oregon, USA, 19-23 March 1994, Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi di Hotel Siranda, Semarang 3 – 15 Desember 1994.
- , 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , 1998, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Press.
- , 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , 1999, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bahan Bacaan Kapita Selekta Hukum Pidana), Semarang : Program S2 (Magister) Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP.
- , 2001, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Sari Kuliah II), Semarang : Program Magister Ilmu Hukum.
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggungan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Atmadja, Mochtar Kusuma, 1991, *Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut*, Jakarta : Sinar Grafika.

- Atmasasmita, Romli, 1996, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung : Mandar Maju.
- , 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif, Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung : Binacipta.
- BPHN, 1997, *Segi-Segi Hukum dari Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bandung : Bina Cipta.
- Danusaputra, St. Munadjat, 1980, *Hukum Lingkungan Buku I : Umum*, Bandung : Bina Cipta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Emirzon, Joni, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Faisal, Sanapiah, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang : Yayasan Asih Asah Asuh.
- , 1992, *Format-Format Penelitian Sosial Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Jakarta : Rajawali.
- Hamdan, M, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung : Mandar Maju.
- Hamzah, Andi, 1992, *Hukum Pidana Politik*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- , 1997, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta : Sapta Artha Jaya.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta ; Gadjah Mada University Press.
- Kartono, Kartini, 1976, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung : Alumni.
- Koeswadji, Hermin Hadiati, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ketetapan MPR RI Tahun 1999 termasuk GBHN RI 1999 – 2004, Solo : Sendang Ilmu.

Lamintang, P.A.F, dan Samosir, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Baru.

\_\_\_\_\_, P.A.F, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : Armico.

Lotulung, Paulus Effendi, 1993, *Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni.

\_\_\_\_\_, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Di Dalam Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Korporasi*, Makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di UNDIP tanggal 23-24 November 1998.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.

\_\_\_\_\_, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.

Muladi dan Priyatno, Dwidja, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung ; Sekolah Tinggi Hukum Bandung.

Moleong, Lexy J., 1993, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosdakarya.

\_\_\_\_\_, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP.

Moeljatno, 1980, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty.

\_\_\_\_\_, 1982, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.

\_\_\_\_\_, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.

Poernomo, Bambang., 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

\_\_\_\_\_, 1998, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Yogyakarta : Liberty.

Prastyo, Rudi, *Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-Penyimpangan*, Makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di UNDIP tanggal 23 – 24 November 1989.

R. Sugandhi, 1980, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional.

Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung : Alumni.

, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial (Disertasi)*, Bandung : Alumni.

, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni.

Reksodiputro, Mardjono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi di UNDIP tanggal 23 – 24 November 1989.

Sahetapy, JE, 1994, *Kejahatan Korporasi*, Bandung : Eresco.

\_\_\_\_\_, 1995, *Hukum Pidana* (Kumpulan karya D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. Ph. Sitorius), Yogyakarta : Liberty.

Soleh, Roeslan, 1978, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru.

\_\_\_\_\_, 1978, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru.

\_\_\_\_\_, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru.

\_\_\_\_\_, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

\_\_\_\_\_, 1985, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan Dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru.

Saleh, K. Wantjik, 1981, *Pelengkap KUH Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Salim, Emil, 1991, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta : LP3ES.

Silalahi, Daud, 1992, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung : Alumni.

- \_\_\_\_\_, 1981, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung : Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Penegakan Hukum*, Bandung : Binacipta.
- \_\_\_\_\_, 1999, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soemadipradja, Achmad S., 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Soemarwoto, Otto, 1990, *Analisis Dampak Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Soemitro, Rony Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1979, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_, 1991, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta : Djambatan.
- Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar tetap dalam Mata Pelajaran Hukum Pidana pada FH UNDIP tanggal 21 Desember 1974.
- \_\_\_\_\_, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung : Sinar Baru.
- \_\_\_\_\_, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang : Fakultas Hukum UNDIP.
- Sumardjono, Maria S.W., 1997, *Pedoman Pembuat Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Suparni, Naniek, 1992, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Suwondo, 1982, *Himpunan Karya Tentang Hukum Pidana*, Yogyakarta : Liberty.
- Thalib, Dahlan dan Karmelia, Mila, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta : FH-UII.

Van Bemmelem, J.M., 1987, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bandung : Bina Cipta.

Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XV No. 171 Desember 1999.

Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XV No. 169 Oktober 1999.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.